

BAB 10

Prospek, Tantangan, dan Arah Kebijakan Perekonomian

Perekonomian Indonesia diprakirakan berada dalam lintasan yang terus membaik. Respons kebijakan makroekonomi yang konsisten dan antisipatif perlu terus ditempuh guna mengawal perekonomian sehingga dapat berkembang dengan struktur yang lebih kuat, berimbang, dan berkesinambungan.

Prospek perekonomian Indonesia pada 2018 dan 2019 diprakirakan membaik dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Prospek perekonomian yang membaik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, serta keseimbangan eksternal yang terjaga. Momentum positif dari alobal dan domestik pada 2017 menjadi basis bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai Inflasi yang diprakirakan tetap rendah dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2018-2019 sebesar 3,5±1%, dipengaruhi terjaganya ekspektasi inflasi dan terkendalinya permintaan domestik, Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan mencatat surplus pada 2018-2019, didorong peningkatan arus masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan (TB) yang tetap terjaga di bawah 2,5% PDB. Dalam jangka menengah, prospek perekonomian domestik terus tumbuh ke lintasan yang lebih tinggi, didukung dampak positif implementasi reformasi struktural yang optimal dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terpelihara.

Di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi, beberapa tantangan masih mengemuka yang berpotensi mengganggu kesinambungan prospek perekonomian. Tantangan jangka pendek dari global terkait dengan upaya memitigasi risiko yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, potensi gejolak geopolitik yang masih berlanjut, dan kebijakan proteksionisme perdagangan yang meningkat. Tantangan untuk memitigasi risiko global semakin kuat karena ekonomi global dalam jangka menengah diwarnai penurunan produktivitas akibat investasi yang masih terbatas dan populasi yang menua, terutama di berbagai negara maju. Tantangan lain terkait dengan upaya meminimalkan risiko domestik seperti proses konsolidasi ekonomi yang terus berlanjut, ruang stimulus fiskal yang masih terbatas, dan penurunan aliran modal asing yang dipicu oleh berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter negara maju. Selain itu, tantangan juga muncul berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko inflasi yang meningkat terkait kenaikan harga minyak dan harga komoditas pangan. Dalam jangka menengah, masih terdapat beberapa tantangan struktural dari domestik yang dapat menghambat berlanjutnya pemulihan ekonomi. Tantangan tersebut

berkaitan dengan penguatan daya saing perekonomian, penguatan kapasitas dan kapabilitas industri, penciptaan ekonomi yang inklusif, penyediaan sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, dan perkembangan teknologi digital.

Respons kebijakan ditempuh untuk mengawal perekonomian sehingga dapat tumbuh dengan struktur yang lebih baik dan ditopang stabilitas yang kokoh. Dalam kaitan ini, arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan. Respons kebijakan dilakukan melalui sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SPPUR), serta kebijakan struktural. Peran reformasi struktural menjadi penting untuk dilakukan secara konsisten guna menjawab tantangan jangka menengah dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian.

10.1. PROSPEK PEREKONOMIAN

Prospek perbaikan ekonomi domestik ke depan tidak terlepas dari prakiraan berlanjutnya pemulihan ekonomi global. Perbaikan ekonomi dunia pada 2017 diprakirakan berlanjut pada 2018–2019 dengan sumber pendorong pertumbuhan yang mulai bergeser ke negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2018 diprakirakan meningkat menjadi 3,9% dari 3,7% pada 2017 (Tabel 10.1). Kenaikan pertumbuhan pada 2018-2019 terutama didorong oleh negara berkembang,

Tabel 10.1. Proyeksi PDB Dunia

Persen

Names / Valancels Names	2017	Proyeksi		
Negara / Kelompok Negara	Negara 2017		2019	
PDB Dunia	3,7	3,9	3,9	
Negara Maju	2,3	2,3	2,2	
AS	2,3	2,7	2,5	
Jepang	1,8	1,2	0,9	
Eropa	2,5	2,2	2,0	
Negara Berkembang	4,7	4,9	5,0	
Tiongkok	6,9	6,6	6,4	
India	6,7	7,4	7,8	

Sumber: WEO, IMF

Keterangan: Data *update* Januari 2018

di tengah berlanjutnya proses rebalancing ekonomi Tiongkok yang berlangsung gradual. Ekonomi Tiongkok diprakirakan masih tumbuh cukup tinggi ditopang konsumsi dan ekspor, meskipun sudah sedikit melambat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi India juga diprakirakan meningkat cukup signifikan seiring hilangnya dampak temporer dari kebijakan demonetisasi dan penerapan sistem pajak baru. Dari negara maju, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari Amerika Serikat (AS). Kenaikan pertumbuhan ekonomi AS dipicu oleh stimulus fiskal melalui kebijakan reformasi perpajakan terutama dari sisi investasi seiring dengan penurunan pajak korporasi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan masih stabil pada level 3,9% terutama ditopang negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju diprakirakan sedikit melambat.

Pemulihan ekonomi global yang berlanjut akan berkontribusi positif pada volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Volume perdagangan dunia diprakirakan tetap tumbuh positif. International Monetary Fund (IMF) memprakirakan volume perdagangan dunia tumbuh mencapai 4,6% pada 2018 dan 4,4% pada 2019. Aktivitas perdagangan dunia yang tumbuh tinggi terutama ditopang oleh menguatnya perdagangan intrareaional di Asia dan pemulihan penguatan permintaan dari kawasan Amerika Utara. Kondisi tersebut terutama sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih solid. Sementara itu, harga komoditas juga diprakirakan tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari 2017. Sejalan dengan kenaikan harga komoditas alobal, indeks harga komoditas ekspor Indonesia (IHKEI) juga diprakirakan tetap tumbuh positif yakni 2,8% pada 2018.

Prospek perbaikan ekonomi dunia diprakirakan berpengaruh positif pada terkendalinya pasar keuangan dunia, meskipun perlu dicermati risiko dari normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju. Faktor utama yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan dunia pada 2018 ialah berlanjutnya arah normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju. Kenaikan suku bunga kebijakan AS dan pengurangan neraca bank sentral (balance sheet reduction) diprakirakan terus berlanjut pada 2018. Sementara itu, bank sentral Eropa pada 2018 diprakirakan tetap mempertahankan kebijakan moneter akomodatif meskipun kecepatan pengurangan pembelian aset perlu menjadi perhatian.

Perkembangan arah kebijakan moneter negara maju tersebut berpotensi memengaruhi aliran modal asing, termasuk potensi berkurangnya aliran modal masuk ke negara-negara berkembang.

Prospek Jangka Pendek

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Prospek perbaikan ekonomi global dan beberapa perkembangan positif domestik berpotensi terus mendorong perbaikan ekonomi Indonesia pada 2018-2019. Pertumbuhan ekonomi pada 2018-2019 diprakirakan meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6% (Tabel 10.2). Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut terutama ditopang oleh peran permintaan domestik yang meningkat sebagai sumber pertumbuhan.

Permintaan domestik terutama berasal dari investasi yang menguat, baik investasi bangunan maupun investasi nonbangunan. Perbaikan investasi didukung oleh sektor swasta melalui perbaikan keyakinan pelaku usaha, dan sektor Pemerintah melalui kelanjutan belanja yang berkualitas. Peran stimulus fiskal juga diprakirakan cukup besar, tidak hanya dari investasi tetapi juga dari konsumsi, didukung prospek pajak yang membaik. Konsumsi swasta sebagai kontributor utama ekonomi Indonesia diprakirakan mulai meningkat, didukung daya beli yang terjaga, termasuk dari program perlindungan sosial yang lebih luas. Sementara itu, ekspor diprakirakan sedikit melambat namun masih tumbuh positif seiring dengan prakiraan harga komoditas yang tetap tinggi dan permintaan global yang masih kuat.

Kinerja investasi diprakirakan berada dalam tren yang meningkat pada 2018 dan 2019 didukung oleh stimulus

→ Tabel 10.2. Proyeksi PDB Sisi Pengeluaran 2018-2019

Davas

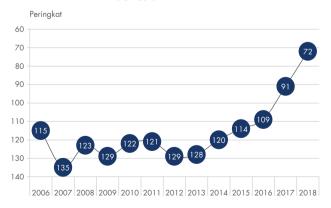
			1 613611
Komponen	2017	2018	2019
Produk Domestik Bruto	5,07	5,1 - 5,5	5,2 - 5,6
Konsumsi Swasta	4,98	4,9 - 5,3	4,9 - 5,3
Konsumsi Pemerintah	2,14	3,7 - 4,1	3,8 - 4,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,15	6,5 - 6,9	6,5 - 6,9
Ekspor Barang dan Jasa	9,09	6,3 - 6,7	6,0 - 6,4
Impor Barang dan Jasa	8,06	7,2 - 7,6	6,6 - 7,0

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

pemerintah melalui belanja modal disertai berlanjutnya ekspansi sektor swasta. Pertumbuhan investasi pada 2018 dan 2019 diprakirakan meningkat pada kisaran 6,5-6,9%, ditopang oleh investasi bangunan dan nonbangunan (Tabel 10.2). Investasi bangunan diprakirakan naik sejalan dengan penyelesaian proyekproyek infrastruktur strategis yang sudah ditargetkan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang Asian Games (Gambar 10.1). Sementara itu, investasi nonbangunan hingga 2019 diprakirakan juga terus meningkat, terutama berupa mesin dan peralatan, seiring ekspansi sektor swasta khususnya untuk industri pengolahan, pengangkutan, jasa-jasa, dan industri terkait lainnya.

Prospek peningkatan investasi juga dipengaruhi konsistensi Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi sehingga dapat meningkatkan keyakinan dan minat pelaku usaha dalam berinvestasi. Pemerintah berkomitmen untuk menata regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan penanaman modal. Penataan regulasi termasuk dengan melakukan integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha. Sejauh ini, upaya untuk memperbaiki iklim usaha telah menunjukkan perkembangan positif dan diprakirakan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan berbagai upaya tersebut tercermin dari membaiknya peringkat ease of doing business Indonesia dari posisi 91 menjadi 72 pada tahun 2018 (Grafik 10.1).

Grafik 10.1. Perinakat Ease of Doing Business Indonesia



Sumber: World Bank

Konsumsi swasta diprakirakan sedikit meninakat dibandingkan dengan capaian 2017. Pertumbuhan konsumsi swasta pada 2018 dan 2019 diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,3% (Tabel 10.2). Prospek konsumsi swasta tersebut tidak terlepas dari prakiraan konsumsi rumah tangga yang membaik, dan ditopang daya beli yang tetap terjaga seiring potensi peningkatan pendapatan dari ekspor serta inflasi yang terjaga pada level rendah. Prospek konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh stimulus fiskal dari Pemerintah melalui berbagai instrumen belanja fiskal.

Stimulus pemerintah pada 2018 diprakirakan membantu kinerja konsumsi rumah tangga. Stimulus pemerintah yang memengaruhi konsumsi rumah tangga antara lain terkait belanja pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada dan pemilu pada 2018-2019, subsidi, dan bantuan sosial. Secara keseluruhan, komponen konsumsi pemerintah terkait subsidi dan bantuan sosial meningkat (Grafik 10.2). Pemerintah dalam APBN 2018 menargetkan belanja subsidi untuk listrik serta energi tidak banyak berbeda dibandingkan dengan subsidi pada 2017. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung tetap terjaganya konsumsi. Selain itu, program bantuan tunai bersyarat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperluas dari 6 juta keluarga pada 2017 menjadi 10 juta keluarga pada 2018.² Komitmen perluasan penerima manfaat yang diiringi dengan perbaikan koordinasi dan integrasi program bantuan sosial pada gilirannya mendorong konsumsi rumah tangga.

Grafik 10.2. Alokasi Subsidi dan Bantuan Sosial dalam APBN



Konsumsi swasta merupakan penggabungan dari konsumsi rumah tangga (RT) dan konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT). Dalam komposit tersebut, porsi konsumsi RT sekitar 98% dari total konsumsi swasta.

² Data Kementerian Sosial

Gambar 10.1. Proyek Strategis Nasional (PSN)



Sumber: KPPIP

Konsumsi swasta yang membaik didukung oleh prakiraan konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) yang meningkat. Konsumsi LNPRT diprakirakan meningkat seiring dengan belanja kampanye dari partai politik menjelang penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Belanja LNPRT yang tinggi turut memberikan dampak lanjutan pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Kinerja ekspor pada 2018-2019 diprakirakan tetap positif, ditopang oleh harga komoditas yang tetap tinggi dan permintaan dunia yang kuat. Pada 2018-2019, ekspor diprakirakan tumbuh cukup baik dalam kisaran 6,3-6,7% dan 6,0-6,4%, meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan capaian pada 2017. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan ekspor Indonesia yang diprakirakan tumbuh sedikit melambat seiring dengan proses *rebalancing* ekonomi yang gradual.

Prospek ekspor yang cukup baik juga didukung oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan diversifikasi pasar untuk produk ekspor nonmigas melalui berbagai langkah reformasi struktural. Peran ekspor nonmigas dari industri pengolahan diproyeksikan meningkat seiring dengan selesainya pembangunan smelter. Prospek ekspor yang positif juga ditopang oleh perbaikan sektor pendukung logistik ekspor-impor seperti pelabuhan, bandara, serta akses jalan dan jalur kereta. Penyelesaian berbagai sektor pendukung tersebut akan mendorong upaya penurunan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan ekspor.

Perbaikan prospek permintaan domestik serta ekspor selanjutnya akan mendorong impor. Bank Indonesia memprakirakan impor tumbuh masing-masing dalam kisaran 7,2-7,6% dan 6,6-7,0% pada 2018-2019 (Tabel 10.2). Berdasarkan komponennya, prospek kenaikan impor tidak hanya disumbang oleh impor barang konsumsi, tetapi juga bersumber dari impor barang modal untuk keperluan investasi dan ekspor, serta bahan baku untuk kegiatan produksi di domestik.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan 2019 terutama akan ditopang LU konstruksi, LU industri pengolahan, serta LU perdagangan, hotel, dan restoran. Selain itu, harga komoditas yang tetap tinggi juga berpengaruh positif terhadap beberapa LU lain terutama pertanian serta pertambangan dan penggalian.

Kinerja positif LU konstruksi sejalan dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur, terutama untuk konektivitas, energi, perumahan, dan proyek fisik lainnya. LU konstruksi pada 2018-2019 diprakirakan tumbuh masing-masing dalam rentang 7,2-7,6% dan 7,3-7,7%, meningkat dari 6,8% pada 2017 (Tabel 10.3). Belanja pemerintah untuk infrastruktur mengalami peningkatan menjadi Rp410,4 triliun pada 2018 dari Rp388,3 triliun pada 2017. Anggaran infrastruktur dialokasikan antara lain untuk pembangunan jalan baru sepanjang 832 km, bendungan baru sebanyak 15 unit, embung baru sebanyak 92 unit, jembatan baru sepanjang 15.373 m, pelabuhan laut di 17 lokasi, jaringan irigasi sepanjang 947 km, bandara baru di 8 lokasi, jalur kereta api sepanjang 639 km, proyek kelistrikan untuk mencapai rasio elektrifikasi 95,15%, dan rumah susun sebanyak 13.405 unit.

Kinerja LU industri pengolahan diprakirakan membaik pada 2018 dan 2019. LU industri pengolahan pada 2018-2019 diprakirakan tumbuh masing-masing dalam rentang 4,5-4,9% dan 4,6-5,0%, meningkat dari 4,3% pada 2017 (Tabel 10.3). Prospek yang positif didukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kembali peran sektor industri. Upaya tersebut terus ditempuh Pemerintah dalam kerangka reformasi struktural di sektor riil guna meningkatkan nilai tambah perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kaitan ini, kebijakan sektor industri yang ditempuh, antara lain melalui (i) pengembangan industri berbasis sumber daya alam, terutama industri agro, mineral, migas, dan batu bara dalam rangka pendalaman struktur industri dan upgrading produk hasil industri; (ii) peningkatan kapabilitas dan daya saing industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; (iii) pembukaan pusat-pusat industri baru (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus) terutama di luar Pulau Jawa disertai pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara) dan energi yang kompetitif bagi industri; dan (iv) peningkatan akses ekspor baik dengan negara mitra dagang utama maupun pengembangan pasar nontradisional negara tujuan ekspor.

Lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran diprakirakan juga meningkat pada 2018-2019. LU

Tabel 10.3. Proyeksi PDB Sisi Lapangan Usaha 2018-2019

Persen

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Produk Domestik Bruto	5,07	5,1 - 5,5	5,2 - 5,6
Pertanian	3,81	2,8 - 3,2	3,0 - 3,4
Pertambangan & Penggalian	0,69	2,1 - 2,5	1,9 - 2,3
Industri Pengolahan	4,27	4,5 - 4,9	4,6 - 5,0
Listrik, Gas & Air Bersih*	1,76	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7
Konstruksi	6,79	7,2 - 7,6	7,3 - 7,7
Perdagangan, Hotel & Restoran**	4,64	4,7 - 5,1	4,8 - 5,2
Pengangkutan & Komunikasi***	9,22	9,1 - 9,5	9,1 - 9,5
Keuangan, Persewaan & Jasa****	5,44	5,5 - 5,9	5,6 - 6,0
Jasa-iasa****	4,34	4,3 - 4,7	4,3 - 4,7

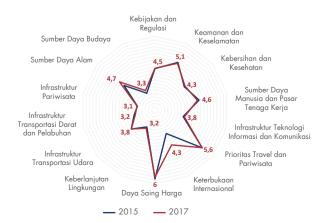
Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Keterangan:

perdagangan, penyedigan akomodasi (hotel), dan makan minum (restoran) pada 2018-2019 diprakirakan tumbuh masing-masing dalam rentang 4,7-5,1% dan 4,8-5,2%, meningkat dari 4,6% pada 2017. Prospek positif kinerja LU tersebut didukung oleh prakiraan meningkatnya pendapatan dan jumlah penduduk kelas menengah yang terus tumbuh.

Meningkatnya kinerja LU perdagangan, penyediaan akomodasi (hotel), dan makan minum (restoran) tersebut juga dipengaruhi oleh terus berkembananya sektor pariwisata seiring dukungan dari berbagai program pemerintah dalam mendorong promosi destinasi wisata Indonesia. Anggaran belanja pemerintah di sektor pariwisata meningkat hingga 123% pada 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan antara lain oleh pengembangan destinasi pariwisata baru dan promosi pariwisata dalam negeri yang dilakukan secara lebih intensif ke mancanegara. Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames serta Annual Meeting IMF-World Bank Group juga berpotensi mendorong kenaikan pertumbuhan sektor pariwisata. Sejauh ini, berbagai upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata mulai menunjukkan hasil positif. Laporan Travel and Tourism Index yang diterbitkan World Economic Forum menunjukkan kenaikan peringkat dari 50 ke 42 selama 2015-2017. Perbaikan peringkat didorong oleh beberapa faktor, terutama dari faktor keterbukaan sektor pariwisata untuk investor serta pemberdayaan sumber daya alam untuk pariwisata (Grafik 10.3).

Grafik 10.3. Daya Saing Pariwisata



umber: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 dan 2017, World

Keterangan: Nilai yang lebih besar menunjukkan tingkat yang lebih baik

Penggabungan 2 lapangan usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas; (ii) Pengadaan air ** Penggabungan 2 lapangan usaha: (i) Perlagaan dan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; (ii) Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum

*** Penggabungan 2 lapangan usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan; (ii) Informasi dan

^{****} Penggabungan 3 lapangan usaha: (i) Jasa Keuangan; (ii) Real Estate; (iii) Jasa Perusahaan ggabungan 4 lapangan usaha: (i) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; (ii) Jasa Pendidikan; (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya; (iv) Jasa Lainnya

Sejalan dengan perbaikan prospek beberapa LU yang tersebut di atas, prospek LU pertanian diprakirakan juga membaik pada 2018-2019. LU pertanian diprakirakan tumbuh masing-masing dalam kisaran 2,8-3,2% dan 3,0-3,4%, pada 2018 dan 2019, didukung dampak positif dari prospek harga komoditas ekspor pertanian. Selain itu, prospek membaiknya LU pertanian didukung upaya pemerintah dalam melakukan revitalisasi infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan pengairan, serta penyediaan subsidi benih dan pupuk tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan upaya pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam jangka menengah panjang. Pemerintah juga berupaya mendorong optimalisasi sektor perikanan, antara lain dengan mendorong revitalisasi tambak pada perikanan budidaya, mengembangkan produk olahan rumput laut, dan melakukan penggantian alat untuk perikanan tangkap. Pembangunan dari sisi infrastruktur pendukung pertanian telah dimulai sejak awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan saat ini beberapa proyek telah selesai, bahkan realisasinya telah melampaui target tahun 2019 (Grafik 10.4 dan Grafik 10.5).

Prospek Inflasi

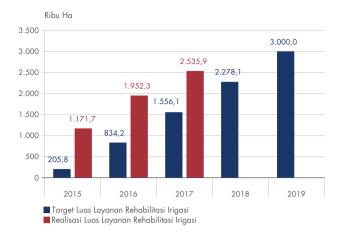
Inflasi tahun 2018-2019 diprakirakan tetap rendah dan stabil pada kisaran 3,5±1% (Tabel 10.4). Prakiraan tersebut ditopang oleh kondisi inflasi Indonesia yang terindikasi telah memasuki rezim inflasi yang rendah dan stabil. Perkembangan dalam empat tahun terakhir menunjukkan inflasi dalam tren melambat, meskipun terdapat tekanan dari inflasi administered

Grafik 10.4. Kemajuan Pembangunan Irigasi



Sumber: KPPIP

Grafik 10.5. Kemajuan Rehabilitasi Irigasi



Sumber: KPPIP

prices. Keberhasilan menjaga inflasi secara konsisten pada rentang sasarannya selama tiga tahun terakhir berkontribusi dalam membawa ekspektasi inflasi lebih terjangkar ke sasaran inflasi. Tingkat ekspektasi inflasi yang terjaga terlihat pada prakiraan inflasi beberapa lembaga internasional yang masih dalam rentang sasaran (Grafik 10.6). Perkembangan positif ekspektasi inflasi pada gilirannya akan mendukung tetap terkendalinya inflasi. Prospek inflasi yang terkendali ditopang oleh seluruh komponen inflasi, yakni inflasi administered prices, inflasi volatile food, dan inflasi inti. Namun demikian, prospek inflasi dalam jangka pendek masih mengandung risiko terkait potensi berlanjutnya kenaikan harga pangan dan harga minyak. Dalam rangka memitigasi berbagai potensi risiko tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Inflasi inti diprakirakan tetap terkendali selama 2018-2019 sejalan dengan tekanan harga global yang masih moderat, peningkatan permintaan domestik yang terkendali, dan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Kendati harga minyak dunia meningkat, harga komoditas

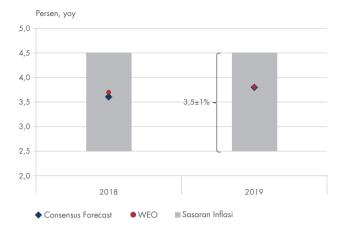
Tabel 10.4. Proyeksi Perekonomian Indonesia 2018-2019

Persen

Komponen	2017	2018	2019
Produk Domestik Bruto	5,07	5,1 - 5,5	5,2 - 5,6
Inflasi	3,61	2,5 - 4,5	2,5 - 4,5
Defisit TB (% PDB)	1,7	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5
Kredit	8,2	10,0 - 12,0	

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Grafik 10.6. Prakiraan Inflasi oleh Lembaga Internasional



Sumber: Consensus Forecast dan WEO, diolah

impor nonmigas diprakirakan masih terkendali sehingga memberikan tekanan yang minimal pada inflasi. Sementara itu, kenaikan permintaan domestik yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi diprakirakan masih dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi domestik. Ekspektasi inflasi yang terjangkar dengan baik juga turut membantu terkendalinya inflasi inti. Selain itu, risiko dampak lanjutan dari inflasi administered prices dan inflasi volatile food cukup minimal sejalan dengan terkendalinya inflasi kedua komponen tersebut.

Inflasi administered prices pada 2018-2019 diprakirakan lebih rendah dari level tahun-tahun sebelumnya. Potensi peningkatan tekanan inflasi yang berasal dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar dan energi diprakirakan minimal pada 2018 sebagaimana tercermin dalam postur APBN 2018. Prakiraan ini pada gilirannya mendorong inflasi tetap terkendali mengingat bobot bahan bakar dan energi dalam keranjang perhitungan inflasi cukup besar.

Inflasi volatile food pada 2018-2019 diprakirakan moderat, didukung kebijakan intensif pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Kebijakan pemerintah ditempuh dengan menjaga kecukupan stok pangan dan meningkatkan produktivitas tanaman pangan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Penguatan tata niaga pangan, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, serta perbaikan manajemen stok dan jaringan distribusi juga terus dilakukan Pemerintah guna meredam tekanan inflasi volatile food. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah juga berperan penting dalam menjaga inflasi yang disebabkan oleh volatile food.

Prospek Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2018-2019 diprakirakan terus mencatat surplus dengan struktur yang lebih kuat sehingga memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional. Prospek NPI ditopang defisit neraca transaksi berjalan (TB) yang tetap sehat dan diprakirakan berada dalam kisaran 2,0-2,5% PDB pada tahun 2018-2019. Kisaran defisit TB yang sedikit lebih tinggi dari kinerja TB 2017 dipengaruhi kenaikan impor sejalan dengan peningkatan permintaan domestik, serta kenaikan pembayaran imbal hasil keluar negeri sejalan dengan arus masuk modal asing. Namun, TB tetap dalam level sehat karena saat bersamaan ekspor diprakirakan meningkat, didorong pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas yang meningkat, meskipun lebih terbatas dibandingkan dengan kinerja pada 2017.

Selain transaksi berjalan yang terjaga sehat, prospek NPI yang positif juga dipengaruhi transaksi modal dan finansial (TMF) yang tidak hanya tetap mencatat surplus namun juga memiliki struktur yang lebih baik. TMF pada tahun 2018-2019 diprakirakan masih mencatat surplus meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun sebelumnya. Surplus TMF didukung oleh prakiraan meningkatnya FDI sejalan dengan perbaikan iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Peningkatan FDI diprakirakan lebih besar dibandingkan dengan arus masuk modal portofolio sehingga meningkatkan kualitas komposisi TMF dengan sumber pembiayaan yang lebih berkesinambungan. Sementara itu, modal asing dalam bentuk portofolio diprakirakan juga masih akan mengalir ke Indonesia meskipun terdapat potensi lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Berlanjutnya aliran portofolio tersebut didukung ekses likuiditas global yang masih besar, persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif, dan imbal hasil dalam rupiah yang masih tetap menarik.

Prospek Perbankan

Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2018 diprakirakan membaik sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi domestik. Kredit diprakirakan tumbuh dalam kisaran 10-12% dan DPK diprakirakan tumbuh dalam kisaran 9-11%. Menurunnya risiko kredit perbankan dan prospek menguatnya permintaan kredit terkait prakiraan konsolidasi korporasi yang mulai berakhir mendorong pertumbuhan kredit.

Bersamaan dengan meningkatnya intermediasi perbankan, ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap terjaga. Prakiraan ditopang oleh kemampuan perbankan dalam mengelola risiko kredit dengan cukup baik dan pada akhirnya berkontribusi pada terjaganya rentabilitas dan ketahanan permodalan. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga diprakirakan membaik, dipengaruhi oleh operasi keuangan pemerintah yang cukup besar.

Prospek Perekonomian Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2022 diprakirakan berada pada lintasan yang meningkat dengan tingkat inflasi yang menurun. Prospek perbaikan perekonomian Indonesia juga didukung oleh defisit transaksi berjalan yang masih terjaga di level sehat. Perkembangan positif ini didukung konsistensi kebijakan makroekonomi yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah serta komitmen reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Berbagai langkah reformasi struktural akan memberikan dampak positif pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perekonomian, yang pada akhirnya mendorong penguatan prospek perekonomian dalam jangka menengah.

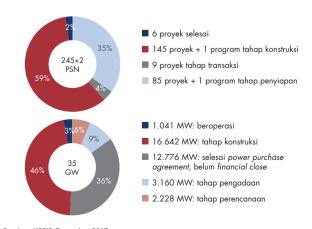
Prospek perekonomian domestik tersebut cukup positif di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diprakirakan tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi global pada 2020-2022 diprakirakan mencapai sekitar 3,9%. Peranan negara berkembang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah diprakirakan lebih besar dibandingkan dengan peran negara maju. Negara-negara berkembang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dengan Tiongkok dan India sebagai motor pertumbuhan. Sementara itu, negara-negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah karena permasalahan produktivitas akibat populasi yang menua dan investasi yang terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan dalam tren meningkat dan mencapai kisaran 5,8-6,2% pada 2022. Prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah yang terus meningkat didukung oleh perbaikan seluruh faktor produksi. Dalam jangka menengah, akumulasi

kapital terutama ditopana investasi infrastruktur yana masih akan berlanjut. Proyek infrastruktur dalam RPJMN diprakirakan membutuhkan dana sekitar Rp 4.800 triliun. Sejalan dengan upaya mendorong infrastruktur tersebut, Pemerintah menetapkan proyek strategis nasional (PSN) sebagai prioritas pembangunan. PSN tersebut terdiri dari 245 proyek dan 2 program pembangunan lain, yakni ketenagalistrikan dan pengembangan industri pesawat terbang dengan nilai sekitar Rp 4.417 triliun. Realisasi PSN yang telah selesai pada 2017 baru mencapai 2% dan sekitar 59% berada dalam tahap konstruksi. Pada program ketenagalistrikan, penyelesaian proyek baru mencapai sekitar 3% dari target 35.000 MW dan sebanyak 46% berada dalam tahap konstruksi (Grafik 10.7). Dengan mempertimbangkan kemajuan berbagai proyek tersebut, akumulasi kapital ke depan diprakirakan terus meningkat.

Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi sumber daya manusia diprakirakan juga semakin baik. Prakiraan tersebut ditopang oleh kemajuan tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Rata-rata lama pendidikan (masa sekolah) dari tenaga kerja diprakirakan terus meningkat secara gradual hingga mencapai 8,8 tahun pada 2022, dari 8,3 tahun pada 2016. Hal ini didukung komitmen pemerintah melalui berbagai program di bidang pendidikan, termasuk melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. Dari sisi anggaran, Pemerintah telah mengalokasikan minimal sebanyak 20% dari APBN untuk dana pendidikan, yang antara lain disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa bidik misi mahasiswa, dan bantuan operasional sekolah (BOS). Berbagai program tersebut bertujuan untuk

Grafik 10.7. Perkembangan Proyek Strategis
Nasional dan Program Ketenagalistrikan



Sumber: KPPIP, Desember 2017 Keterangan: Data per Desember 2017 meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan jumlah anak putus sekolah.

Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka menengah juga didorong naiknya produktivitas sejalan dengan dampak positif dari berbagai proyek infrastruktur dan reformasi struktural melalui berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE). Sejauh ini, Pemerintah telah mengeluarkan 16 PKE yang mendukung percepatan, mulai dari reformasi birokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha, hingga berbagai deregulasi dalam sektor perekonomian. Berbagai reformasi struktural yang dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah diprakirakan mampu mendorong perbaikan produktivitas. Dalam konteks ini, total factor productivity (TFP) pada 2020-2022 diprakirakan tumbuh sekitar 1,3% tiap tahunnya (lihat Boks 10.1. Dampak Paket Kebijakan Ekonomi terhadap Perekonomian).

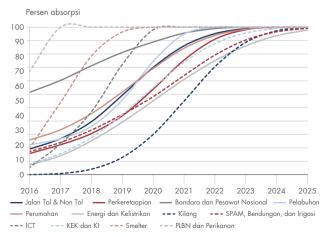
Berdasarkan komponen pengeluaran, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah didukung konsumsi, investasi, serta perbaikan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga diprakirakan cukup resilien dengan pertumbuhan yang stabil. Hal tersebut ditopang proporsi penduduk usia kerja yang diprakirakan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, di samping terus tumbuhnya kelas menengah. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif merupakan bonus demografi yang diprakirakan turut memberikan pengaruh positif pada peningkatan konsumsi. Sejalan dengan kondisi tersebut, konsumsi pemerintah juga diprakirakan tumbuh meningkat, ditopang oleh meningkatnya penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan berbagai kebijakan perpajakan. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal yang lebih besar sehingga dapat mendukung strategi belanja pemerintah yang lebih berkualitas, terutama untuk pembangunan sektor produktif dan perluasan program perlindungan sosial pada sektorsektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan.

Prospek kinerja investasi, baik swasta maupun Pemerintah, diprakirakan juga tumbuh cukup tinggi. Sejalan dengan peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha, peran investasi dalam perekonomian diprakirakan meningkat dengan rasio investasi terhadap PDB yang terus naik. Peningkatan investasi juga ditopang proyek-proyek infrastruktur, baik yang dibiayai oleh Pemerintah maupun swasta, dan diprakirakan terus berlanjut. Dengan mempertimbangkan kemajuan pelaksanaan PSN, mayoritas proyek infrastruktur dapat dilaksanakan sekitar 50% dari total PSN pada tahun 2019 dan 85% pada tahun 2022 (Grafik 10.8).

Kinerja perdagangan internasional diprakirakan tetap positif. Ekspor diprakirakan tetap menunjukkan kinerja yang meningkat, dengan struktur yang semakin membaik. Peningkatan ekspor turut ditopang oleh ekspor nonmigas dari sektor manufaktur sejalan dengan peningkatan produktivitas perekonomian. Impor diprakirakan juga meningkat, dipengaruhi dampak kebutuhan permintaan domestik dan juga untuk pemenuhan input ekspor manufaktur. Namun demikian, impor bahan baku untuk input diprakirakan tetap terkendali seiring dengan tingkat ketergantungan impor yang semakin menurun. Peningkatan kebutuhan impor lain berupa mesin, peralatan, dan komponen lain termasuk untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek infrastruktur.

Inflasi dalam jangka menengah diprakirakan berada pada level yang rendah seiring dampak positif peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Inflasi pada 2020-2022 diprakirakan dapat menurun dalam kisaran 3,0±1%. Prakiraan inflasi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sisi penawaran yang terus membaik dengan kapasitas perekonomian yang meningkat sehingga dapat merespons kenaikan permintaan domestik. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi global diprakirakan tidak kuat seiring pertumbuhan

Grafik 10.8. Estimasi Penyelesaian Proyek-proyek Infrastruktur PSN



Sumber: KPPIP, diolah

ekonomi global dan kenaikan harga komoditas impor yang masih moderat.

Prospek perekonomian nasional jangka menengah yang membaik juga ditopang kinerja positif Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). NPI dalam jangka menengah diprakirakan tetap mencatat surplus sehingga mendukung peningkatan cadangan devisa. Prospek penguatan sektor eksternal tidak terlepas dari pengaruh positif reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Reformasi struktural telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan prospek perekonomian Indonesia. Perkembangan tersebut kemudian menjadi daya tarik bagi penanaman modal asing di Indonesia. Secara keseluruhan berbagai faktor ini terus memperkuat proyeksi NPI ke depan.

Prospek perbaikan NPI dalam jangka menengah dipengaruhi oleh defisit TB yang semakin sehat dan TMF yang tetap surplus. Defisit TB diprakirakan tetap terjaga di level sehat dan berada dalam tren yang menurun, dipengaruhi perkembangan ekonomi global yang cukup kondusif dan dampak positif reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Efisiensi dan produktivitas yang meningkat sejalan dengan reformasi struktural berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia. Daya saing yang meningkat dapat meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor, yang pada akhirnya dapat menurunkan defisit TB. Penurunan defisit TB juga dipengaruhi berkurangnya defisit neraca jasa seiring dampak positif kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor unggulan, khususnya pariwisata.

Perbaikan TMF diprakirakan terus berlanjut. Surplus TMF diprakirakan bersumber dari kenaikan aliran FDI dan peningkatan terbatas aliran masuk modal portofolio. Peningkatan FDI didorong berbagai proyek infrastruktur dan dampak positif PKE yang ditempuh Pemerintah. Sementara itu, aliran masuk modal portofolio dalam jangka menengah diprakirakan meningkat terbatas, dipengaruhi prakiraan tren kenaikan suku bunga dunia akibat ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral AS (FFR). Lebih lanjut, seiring dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang semakin besar dan peningkatan aktivitas ekspor-impor, aliran investasi lainnya yang bersifat pinjaman dan deposit valas diprakirakan meningkat secara moderat.

10.2. TANTANGAN PEREKONOMIAN

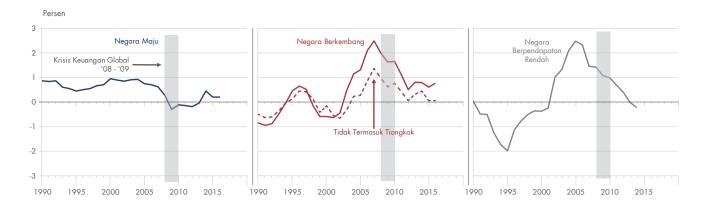
Di tengah optimisme prospek perekonomian ke depan, hasil identifikasi menunjukkan beberapa tantangan masih mengemuka dan perlu mendapat perhatian. Identifikasi berbagai tantangan tersebut menjadi penting dalam mendukung perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan diarahkan tidak hanya untuk memitigasi risiko yang muncul, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat mengawal berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan.

Tantangan perekonomian bersumber dari global dan domestik, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dari global, tantangan jangka pendek yang mengemuka berkaitan dengan upaya untuk memitigasi risiko-risiko terkait perubahan stance kebijakan moneter negara maju ke arah pengetatan, gejolak geopolitik yang masih berlanjut, serta proteksionisme perdagangan yang menunjukkan tendensi meningkat. Risiko pertama dan kedua perlu dicermati karena dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan meningkatkan risiko pembalikan modal dari negara berkembang. Sementara itu, risiko ketiga yakni peningkatan proteksionisme dapat mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional, yang akan berdampak negatif ke ekonomi Indonesia.

Tantangan dari global dalam jangka menengah berkaitan dengan upaya memitigasi dampak negatif dari risiko penurunan produktivitas global yang dapat kembali melemahkan ekonomi dunia. Perkembangan terkini menunjukkan pemulihan ekonomi global masih rentan dan berisiko bersifat temporer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh di berbagai negara. Pada faktor struktural, terjadi penuaan populasi di berbagai negara maju. Selain itu, tantangan struktural global juga diwarnai dengan tingkat produktivitas dunia yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelum krisis keuangan alobal (Grafik 10.9). Penurunan produktivitas disebabkan oleh investasi yang masih rendah dan kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi kapital dan inovasi teknologi.

Tantangan dari domestik juga meliputi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, tantangan domestik terkait dengan upaya untuk mempercepat berakhirnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan,

Grafik 10.9. Produktivitas Ekonomi Dunia



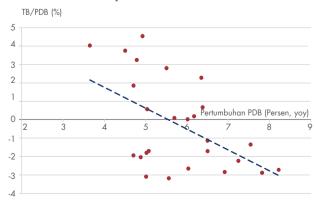
Sumber: IMF, 2017 Keterangan: Rata-rata pertumbuhan 5 tahun

memitigasi risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar, meminimalkan risiko berkurangnya capital inflows jika arah pengetatan kebijakan moneter negara maju lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi pasar, dan menjaga stabilitas makro di tengah risiko peningkatan inflasi. Risiko berlanjutnya periode konsolidasi korporasi dan perbankan dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena menghambat potensi ekspansi usaha. Risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar juga mengemuka akibat penerimaan pajak yang belum optimal dan dapat membatasi peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, risiko berkurangnya capital inflows akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju perlu diantisipasi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Terakhir, inflasi dalam jangka pendek berisiko meningkat akibat kenaikan harga minyak dan komoditas pangan yang melebihi prakiraan. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Dalam jangka menengah, tantangan domestik terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga dapat tumbuh secara berkesinambungan. Upaya memperkuat struktur perekonomian menjadi penting karena berpengaruh pada kemampuan perekonomian untuk tumbuh tinggi tanpa diikuti dengan meningkatnya kerentanan ekonomi yang dapat berujung pada instabilitas. Kerentanan yang paling mengemuka antara lain terkait hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan defisit TB. Pengalaman empiris menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan diikuti oleh peningkatan defisit TB (Grafik 10.10).

Upaya mendorong perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh tinggi, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif setidaknya mencakup lima tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing perekonomian yang perlu terus ditingkatkan. Daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat modal dasar pembangunan, yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi, dan institusi. Tantangan kedua berhubungan dengan upaya untuk membangun kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas. Tantangan tersebut juga termasuk membangun sektor industri yang potensial dan berteknologi tinggi untuk memperkuat struktur ekspor-impor yang dapat meningkatkan daya tahan sektor eksternal terhadap guncangan. Tantangan ketiga terkait upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang belum diikuti dengan turunnya tingkat kesenjangan.

Grafik 10.10. Pertumbuhan PDB dan Transaksi Berjalan



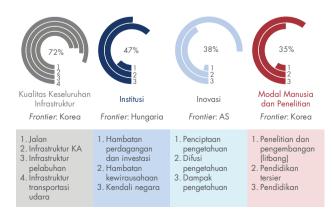
Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah Keterangan: Data mencakup periode tahun 1990-2017 dengan mengeluarkan sampel periode krisis tahun 1998 dan 1999 Tantangan keempat berhubungan dengan upaya memperkuat struktur dan sumber pembiayaan yang masih terbatas, termasuk dari sektor keuangan dan fiskal. Tantangan terakhir terkait upaya untuk mengoptimalkan berbagai peluang yang ada dan sekaligus memitigasi risiko yang dapat muncul dari perkembangan teknologi digital yang pesat.

Tantangan Penguatan Daya Saing Ekonomi

Upaya peningkatan daya saing perekonomian mencakup empat modal dasar pembangunan yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi, dan institusi. Keempat modal dasar ini perlu menjadi perhatian mengingat masih adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan capaian negara frontier (Grafik 10.11). Upaya menutupi kesenjangan pada keempat modal dasar tersebut akan memberikan dampak positif bagi penguatan daya saing ekonomi.

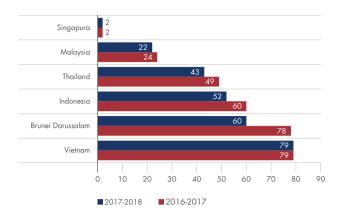
Beberapa tantangan mengemuka dalam memperkuat keempat modal dasar tersebut. Dalam hal infrastruktur, Indonesia masih menghadapi kendala konektivitas sehingga perlu terus mempercepat langkah untuk mengejar ketertinggalan dari beberapa negara di kawasan dalam membangun infrastruktur yang berkualitas (Grafik 10.12). Komitmen dan upaya pemerintah untuk terus membangun infrastruktur mulai menunjukkan hasil positif. Perbaikan kualitas mulai terjadi di semua jenis infrastruktur, baik jalan, kereta api, pelabuhan, hingga bandar udara (Grafik 10.13). Selain itu, Indonesia juga masih perlu terus meningkatkan konektivitas digital

Grafik 10.11. Distance to Frontier Indonesia



Sumber: Global Competitiveness Index 2017, Global Innovation Index 2017, dan PMR OECD 2013, diolah

Grafik 10.12. Perbandingan Peringkat Infrastruktur



Sumber: The Global Competitiveness Report, 2016-2017 & 2017-2018

melalui penggunaan teknologi digital agar sebanding dengan jumlah pengguna internet dan pelanggan *fixed* broadband internet di negara-negara lain yang sudah lebih tinggi (Grafik 10.14).

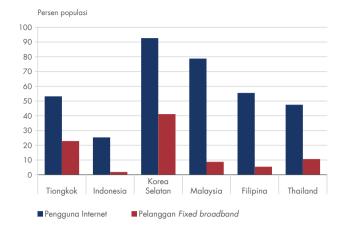
Dalam kaitan dengan modal manusia sebagai modal dasar pembangunan, Indonesia perlu memberikan perhatian pada aspek tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, dan tingkat inovasi yang masih terbatas. Tingkat pendidikan yang tergambar dari rata-rata masa sekolah di Indonesia masih tertinggal (Grafik 10.15). Kondisi yang sama juga terjadi dalam kualitas pendidikan, sebagaimana tampak dari nilai *Program for International Student Assesment* (PISA) Indonesia yang masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan negara-negara lain (Grafik 10.16).

Grafik 10.13. Kualitas Infrastruktur Indonesia



Sumber: The Global Competitiveness Report, 2016-2017 & 2017-2018

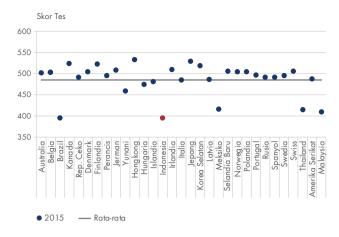
Grafik 10.14. Perbandingan Konektivitas Digital



Sumber: International Telecommunication Union (ITU) 2016

Aspek lain terkait pembangunan modal manusia yakni perlunya menyiapkan tenaga kerja dengan keahlian tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan karena kuantitas dan kualitas pendidikan belum optimal sehingga jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi masih terbatas. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta juga belum banyak, antara lain akibat jumlah tenaga kerja riset di bidang sains dan teknologi yang masih terbatas. Kombinasi dari jumlah tenaga kerja berkeahlian tinggi dan kegiatan litbang yang terbatas memengaruhi rendahnya produktivitas, kapasitas penyerapan teknologi, dan inovasi dalam perekonomian. Kemampuan meningkatkan inovasi menjadi penting agar Indonesia

Grafik 10.16. Perbandingan Kualitas Pendidikan

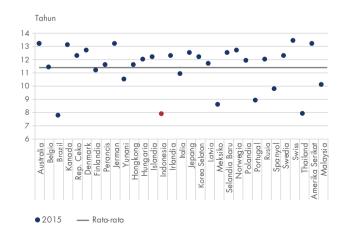


Sumber: OECD

bisa segera sejajar dengan negara lain di kawasan seperti Malaysia, Tiongkok, dan India (Grafik 10.17).

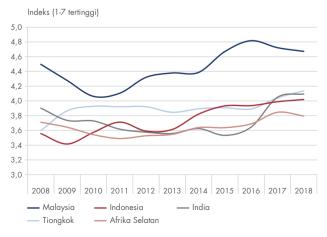
Tantangan lain dari modal dasar ialah konsistensi meningkatkan kualitas kelembagaan di Indonesia. Kualitas kelembagaan antara lain berkaitan dengan kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan yang baik, dan birokrasi yang efisien. Dalam hal kemudahan berusaha, peringkat Indonesia terus menunjukkan peningkatan, meskipun masih di bawah beberapa negara peers sehingga perlu secara konsisten menjadi prioritas perbaikan (Grafik 10.18). Tata kelola pemerintahan Indonesia juga terus mengalami perbaikan, diikuti dengan indeks persepsi korupsi yang juga membaik (Grafik 10.19 dan Grafik 10.20).

Grafik 10.15. Perbandingan Rata-rata Masa Sekolah



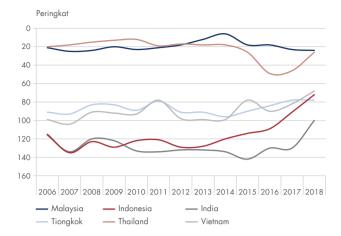
Sumber: OECD

Grafik 10.17. Indeks Inovasi



Sumber: Global Innovation Index 2017

Grafik 10.18. Peringkat Kemudahan Berusaha

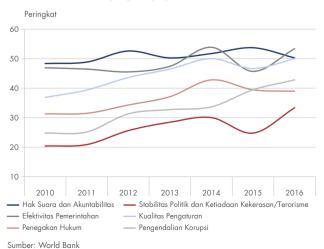


Sumber: Ease of Doing Business, World Bank

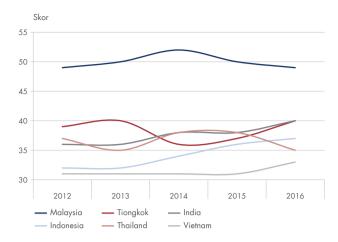
Tantangan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Industri

Tantangan memperkuat kapasitas dan kapabilitas industri terkait dengan upaya membangun struktur perekonomian yang berdaya tahan. Struktur perekonomian perlu diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi saat ini yang kurang menguntungkan yang berpotensi memicu kerentanan dalam ekonomi. Kondisi tersebut antara lain tergambar pada komposisi impor yang sebagian besar ditujukan untuk produksi berorientasi domestik, komposisi ekspor yang masih berbasis komoditas, sektor potensial berteknologi tinggi yang masih memiliki skala ekonomi kecil, jenis produk dan komoditas serta pasar tujuan ekspor yang belum terdiversifikasi, serta kapabilitas sektor jasa yang masih terbatas.

Grafik 10.19. Peringkat Indikator Tata Kelola Pemerintahan



Grafik 10.20. Indeks Persepsi Korupsi

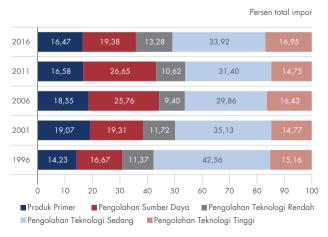


Sumber: Corruption Perception Index 2016, Transparency International

Kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas berpotensi memicu peningkatan impor. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan terkini yang ditandai dengan peningkatan kelas menengah yang kemudian diikuti dorongan kenaikan konsumsi barang impor yang semakin kompleks (Grafik 10.21). Sebagai akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan potensi munculnya ketidakseimbangan eksternal. Ketergantungan terhadap impor yang tinggi dihadapi oleh sektor manufaktur dalam bentuk bahan baku dan bahan penolong untuk produk yang sebagian besar berorientasi ke pasar domestik.

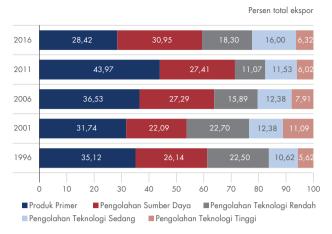
Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas industri juga tercermin pada struktur ekspor yang masih berbasis komoditas, baik komoditas primer maupun produk

Grafik 10.21. Komposisi Impor Indonesia



Sumber: UNCTAD, diolah

Grafik 10.22. Komposisi Ekspor Indonesia



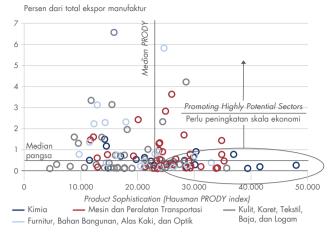
Sumber: UNCTAD, diolah

manufaktur yang berbasis sumber daya alam. Komposisi ekspor tersebut hampir tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan komposisi 20 tahun lalu. Porsi ekspor komoditas primer dan produk berbasis sumber daya alam dalam 10 tahun terakhir rata-rata sebesar 57% dari total ekspor (Grafik 10.22). Tingginya porsi ekspor berbasis komoditas membuat kinerja ekspor menjadi rentan terhadap gejolak harga komoditas global.

Dalam kaitan dengan berbagai kondisi ini, maka tantangan yang mengemuka ialah memperkuat kapasitas industri dalam bentuk pemilihan strategi pertumbuhan yang didasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pencarian sumber-sumber pertumbuhan baru di setiap daerah ini harus dilakukan secara sinergis untuk mewujudkan integrasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan memperbaiki postur TB (lihat Boks 10.2 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah).

Kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas menyebabkan diversifikasi produk ekspor dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi belum berjalan optimal. Upaya mendorong diversifikasi produk ekspor perlu mendapat perhatian karena pangsa ekspor dari produk berteknologi tinggi hingga tahun 2016 masih di bawah 1% (Grafik 10.23). Untuk itu, skala ekonomi dari sektor potensial perlu terus ditingkatkan, antara lain dengan mengurangi hambatan investasi dan mempersiapkan modal manusia yang berkeahlian tinggi. Upaya membangun industri yang berorientasi ekspor dengan jenis produk berteknologi tinggi perlu

Grafik 10.23. Pangsa Ekspor Produk Sophisticated Indonesia

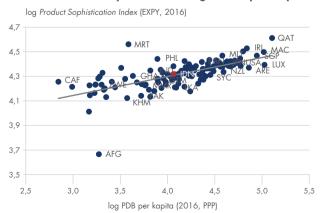


Sumber: UN Comtrade, diolah

dipercepat karena dapat menjadi lompatan menuju negara berpendapatan tinggi. Hal ini tergambar pada perkembangan empiris di dunia yang menunjukkan hubungan positif antara produk ekspor dengan tingkat teknologi tinggi dan pendapatan per kapita (Grafik 10.24).

Kapasitas sektor jasa yang merupakan penopang berbagai kegiatan di sektor manufaktur juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting dilakukan karena perkembangan terkini menunjukkan neraca jasa dalam NPI selalu mengalami defisit. Defisit tersebut utamanya berasal dari jasa transportasi, asuransi, dan keuangan. Defisit di jasa transportasi yang menduduki porsi terbesar, sekitar 80% defisit neraca jasa, terkait dengan kegiatan ekspor-impor. Dari sisi pengangkutan,

Grafik 10.24. Hubungan antara Ekspor Produk Sophisticated dengan PDB per Kapita



Sumber: UN Comtrade, diolah

produk ekspor sebagian besar diangkut oleh armada asing, bahkan produk impor seluruhnya diangkut oleh armada asing. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas jasa pelayaran domestik, sehingga setiap kenaikan ekspor-impor akan selalu diikuti oleh kenaikan defisit jasa transportasi, serta jasa asuransi dan keuangan.

Secara keseluruhan, berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri diarahkan guna memperkuat kembali peran sektor industri dalam perekonomian. Hal ini penting mengingat pertumbuhan sektor industri sejak krisis 1997/98 secara rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum periode krisis. Pangsa sektor industri juga dalam tren menurun sejak tahun 2000 di tengah kondisi pendapatan per kapita yang masih rendah dibandingkan dengan kondisi negara lain. Penurunan pangsa industri yang terlalu cepat ini berbeda dengan pengalaman negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Tiongkok (Grafik 10.25). Pada umumnya, penurunan pangsa sektor industri terjadi ketika suatu negara sudah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi yang ditandai dengan dominasi sektor industri yang selanjutnya diambil alih oleh sektor jasa.

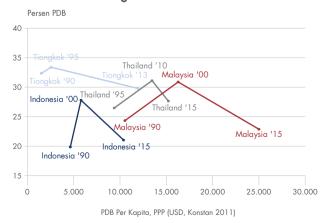
Tantangan Penciptaan Ekonomi yang Inklusif

Tantangan lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas adalah upaya menciptakan ekonomi inklusif guna menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Kesenjangan tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional tapi juga secara spasial, baik dilihat dari kota-desa maupun dari intrapulau. Namun, kondisi terkini menunjukkan upaya untuk menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi menghadapi kendala antara lain akibat belum meratanya distribusi tingkat pendidikan, kesempatan kerja, dan kepemilikan aset keuanaan.

Tantangan pembangunan ekonomi inklusif semakin menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan dan kesejangan di Indonesia perlu terus diturunkan agar sejalan dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat. Sejak tahun 2004, Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah dan menjadi negara berpendapatan menengah. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih terus dalam kecenderungan meningkat mencapai di atas 3.500 dolar AS, dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun di bawah 10%. Namun demikian, penurunan kemiskinan perlu terus dilakukan sehingga dapat sejajar dengan level di negaranegara Asia (Grafik 10.26).

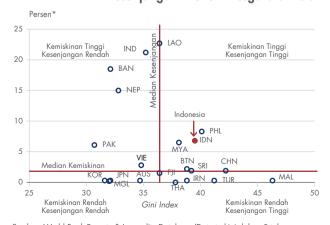
Tantangan menurunkan kesenjangan juga berkaitan dengan kesenjangan spasial, baik antara perkotaan dengan pedesaan maupun kesenjangan intrapulau. Tingkat kesenjangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan di perdesaan, sebagaimana ditunjukkan oleh lebih lebarnya kesenjangan antara penduduk terkaya dan termiskin di perkotaan. Selain itu, kesenjangan juga terjadi dalam satu pulau di Indonesia. Kesenjangan pendapatan per kapita penduduk terlihat yakni antara Jawa bagian utara

Grafik 10.25. Pangsa Industri Pengolahan Beberapa Negara



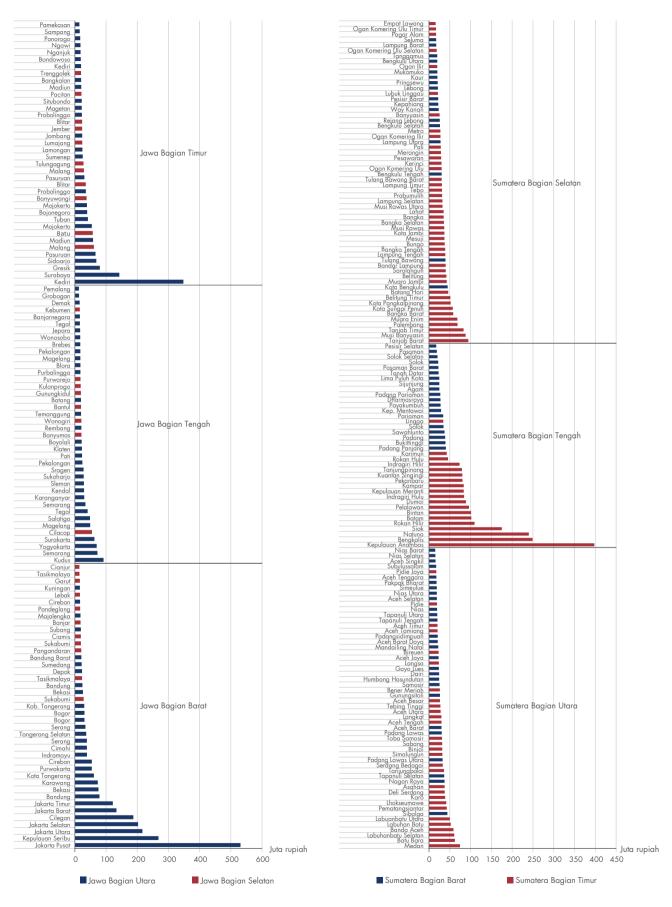
Sumber: World Development Indicators, World Bank

Grafik 10.26. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Negara di Asia



Sumber: World Bank Poverty & Inequality Database (Data terkini dalam 5 tahun 2011-2016), diolah Keterangan: *Tingkat kemiskinan dengan garis batas kemiskinan 1,9 dolar AS per hari

Grafik 10.27. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa dan Sumatera



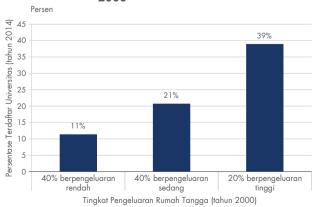
Sumber: BPS 2014-2015, diolah

dan bagian selatan, serta antara Sumatera bagian timur dan barat (Grafik 10.27). Perkembangan ini berimplikasi pada semakin pentingnya membangun konektivitas antardaerah serta membangun berbagai potensi daerah yang masih tertinggal.

Upaya mempercepat penurunan kesenjangan tersebut dihadapkan pada belum meratanya akses seluruh kelompok masyarakat terhadap pendidikan. Dalam kaitan ini, tantangan pemerataan pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan pada semua level pendapatan dan status sosial. Kondisi saat ini menunjukkan masih terbatasnya peluang masyarakat berpendapatan rendah untuk dapat mencapai status sosial yang lebih baik melalui akses pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan survei, anak-anak dengan orang tua berpendapatan 20% teratas lebih berkesempatan untuk mencapai pendidikan hingga tingkat universitas dengan peluang sebesar 39%. Sebaliknya, peluang anakanak dengan orang tua berpendapatan 40% terbawah untuk mencapai pendidikan hingga tingkat universitas peluangnya hanya sebesar 11% (Grafik 10.28).

Kesenjangan tingkat pendidikan yang terjadi berdampak pada tingkat keahlian dan kesempatan kerja yang juga belum merata. Sejalan dengan proses industrialisasi yang sedang berlangsung, permintaan terhadap pekerja berkeahlian tinggi di Indonesia terus meningkat. Namun demikian, permintaan ini belum diimbangi dengan jumlah pekerja dengan tingkat keahlian yang memadai. Akibatnya, kondisi ini mendorong tingkat upah pekerja berkeahlian tinggi semakin meningkat. Di sisi lain, tenaga

Grafik 10.28. Peluang Pendidikan Anak Hingga
Universitas Tahun 2014 Berdasarkan
Status Ekonomi Rumah Tangga Tahun
2000



Sumber: Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia 2000 dan 2014, RAND Corporation dan Lembaga Demografi, diolah

kerja berkeahlian rendah masih besar, ditandai dengan masih banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal.

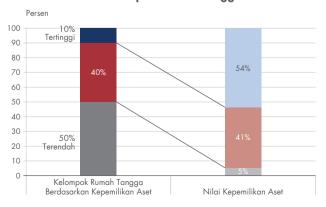
Kesenjangan akses pendidikan yang berimplikasi pada kesempatan kerja yang belum merata tersebut juga disertai dengan ketersediaan akses terhadap aset fisik dan keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa ketersediaan untuk kelompok kaya lebih baik ketimbang kelompok miskin. Berdasarkan survei, jumlah aset yang dimiliki oleh 10% orang terkaya di Indonesia mencapai 54% dari total nilai aset (Grafik 10.29).

Tantangan Pembiayaan Ekonomi yang Berkesinambungan

Tantangan pembiayaan ekonomi berkaitan dengan upaya membangun sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, baik yang bersumber dari swasta maupun Pemerintah. Dari sisi swasta, tantangan berkaitan dengan upaya memperdalam pasar keuangan domestik guna menggali sumber-sumber pembiayaan baru yang dapat mendukung kegiatan ekonomi secara berkesinambungan. Sementara dari sisi Pemerintah, tantangan berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat menopang pengeluaran pemerintah dan kesinambungan fiskal.

Tantangan penguatan struktur pembiayaan bagi swasta meliputi beberapa hal antara lain sumber pendanaan yang didominasi jangka pendek dan

Grafik 10.29. Tingkat Kepemilikan Aset Berdasarkan Kelompok Rumah Tangga

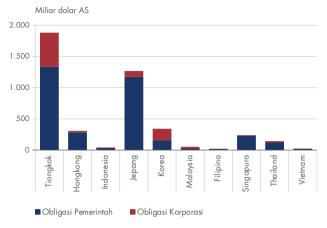


Sumber: Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia 2014, RAND Corporation dan Lembaga Demografi, diolah

struktur biaya dana yang masih mahal. Terkait jangka waktu pembiayaan, secara umum struktur pembiayaan berjangka panjang belum besar baik di perbankan maupun di obligasi. Peran industri perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi yang bersifat jangka panjang masih terbatas akibat sebagian besar sumber dana yang dihimpun masih bersifat jangka pendek. Profil sumber dana perbankan domestik yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK) didominasi oleh tenor sampai dengan satu bulan dengan porsi sekitar 76% dari total DPK. Kondisi tersebut pada gilirannya mengurangi keleluasaan perbankan dalam pembiayaan jangka panjang. Selain itu, spread suku bunga kredit dan deposito yang masih cukup lebar juga menyebabkan pembiayaan perbankan masih cukup mahal (Grafik 10.30).

Tantangan terkait pangsa pembiayaan jangka panjang yang belum besar juga terlihat di pasar obligasi. Volume perdagangan obligasi juga masih rendah jika dibandingkan dengan volume negara lain di kawasan (Grafik 10.31). Hal ini mengindikasikan kapasitas dan likuiditas pasar obligasi korporasi masih rendah dan tertinggal. Selain itu, tingkat partisipasi dana pensiun dan asuransi yang merupakan pemberi pinjaman jangka panjang juga masih rendah sebagaimana terindikasi dari masih rendahnya jumlah dana yang diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) berjangka waktu di atas sepuluh tahun. Ke depan, kepemilikan SBN oleh dana pensiun dan asuransi diharapkan dapat meningkat sejalan dengan diterapkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan lembaga jasa keuangan nonbank menempatkan investasinya di SBN.

Grafik 10.31. Volume Perdagangan Obligasi di Pasar Sekunder 2017

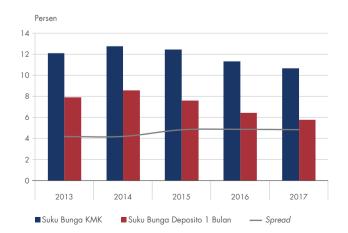


Sumber: ADB Keterangan: Data s.d. Triwulan III 2017

Pembiayaan swasta juga masih banyak ditopang oleh aliran modal asing yang sebagian berjangka pendek sehingga berpotensi menjadi sumber kerentanan bagi perekonomian. Hal tersebut antara lain terlihat pada cukup besarnya porsi dana asing dalam SBN. Sampai dengan triwulan IV 2017, pangsa investor asing di SBN Indonesia masih dalam tren yang terus meningkat dan bahkan paling besar dibandingkan dengan kondisi di sejumlah negara kawasan (Grafik 10.32).

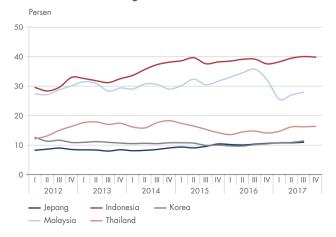
Sejauh ini, beberapa upaya telah ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi swasta untuk mendukung sumber pembiayaan domestik. Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui pengembangan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran

Grafik 10.30. Spread Suku Bunga Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10.32. Pangsa Kepemilikan Asing pada
Obligasi Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan, Bank of Thailand, dan ADB, diolah

Gambar 10.2. Capaian KPBU dan PINA

		A. Nilai Proyek	2016-2017
	3	Financial Close	8,4 Miliar dolar AS
		Transaksi sampai dengan Penandatanganan Kontrak	3,7 Miliar dolar AS
	Ē	Persiapan	13,2 Miliar dolar AS
KPBU	3	B. Jumlah Proyek Financial Close	13
		Transaksi sampai dengan Penandatanganan Kontrak	5
	Ē	Persiapan	27
PINA		2017 Nilai Transaksi 1,5 Miliar dolar A Jumlah Transaksi 5 Transaksi	S

Sumber: Bappenas

Pemerintah (PINA). Skema KPBU mencakup: (i) 13 proyek senilai 8,4 miliar dolar AS dengan status financial close; (ii) 5 proyek senilai 3,7 miliar dolar AS dengan status transaksi sampai dengan penandatanganan kontrak; dan (iii) 27 proyek senilai 13,2 miliar dolar AS dengan status persiapan (Gambar 10.2). Melalui PINA, peran pembiayaan dan kemitraan dengan investor swasta menjadi strategi inti yang bertujuan untuk menciptakan percepatan financial close melalui pembiayaan kreatif. Peran PINA dalam mendukung pembiayaan pada 2017 telah mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Tantangan pembiayaan domestik juga mengemuka dari sisi pemerintah. Kinerja penerimaan negara terutama dari pajak masih perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2017, capaian penerimaan pajak tercatat sebesar 9,9% dari PDB. Capaian tax ratio tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tahun 2016 yang mencapai 10,4% dari PDB. Kinerja penerimaan pajak tersebut perlu dicermati mengingat pentingnya peran pajak dalam mendukung reformasi struktural pemerintah antara lain untuk pembenahan infrastruktur. Penerimaan pajak yang rendah akan berpengaruh pada ketersediaan ruang fiskal untuk belanja infrastruktur yang semakin terbatas dan berisiko mengganggu prospek kesinambungan fiskal.

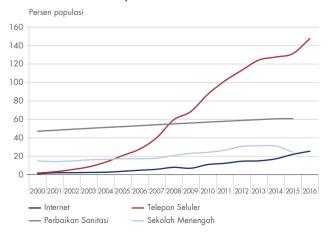
Tantangan Perkembangan Teknologi Digital

Tantangan perekonomian lainnya yang mengemuka yakni upaya untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi digital yang terus meningkat pesat. Di satu sisi, peningkatan teknologi digital dapat memberi manfaat terhadap perekonomian. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga berpotensi memberikan berbagai risiko bagi perekonomian. Kedua hal tersebut perlu terus dicermati dan dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Perkembangan selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa teknologi internet dan telepon seluler mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Akses rumah tangga terhadap teknologi digital seperti telepon seluler jauh lebih besar dibandingkan dengan akses terhadap sanitasi atau pendidikan (Grafik 10.33). Perkembangan tersebut didorong oleh biaya pengembangan konektivitas digital yang lebih murah dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur fisik untuk sanitasi, pendidikan, atau listrik. Kondisi tersebut berimplikasi pada ekonomi digital yang akan terus berkembang pesat, sehingga perlu dicermati manfaat dan risiko yang dapat ditimbulkan.

Di satu sisi, perkembangan teknologi digital dapat memberikan manfaat bagi perekonomian terutama melalui peningkatan efisiensi dan inovasi (Grafik 10.34). Salah satu dampak terbesar yang dapat ditimbulkan oleh ekonomi digital adalah penurunan biaya transaksi ekonomi dan sosial. Hal ini terjadi karena dalam *platform* ekonomi digital, biaya marjinal untuk menghasilkan setiap tambahan *output* produksi semakin murah meskipun membutuhkan biaya yang besar di awal proses bisnis. Semakin murahnya biaya

Grafik 10.33. Perkembangan Akses Internet dan Telepon Seluler di Indonesia



Sumber: World Development Indicators, World Bank

Grafik 10.34. Manfaat Teknologi Digital bagi Dunia Usaha, Masyarakat, dan Pemerintah



Sumber: Diadaptasi dari World Development Report 2016, World Bank

marjinal produksi barang pada bisnis ekonomi digital ini berbeda dengan bisnis konvensional yang menghadapi kenaikan biaya marjinal produksi barang pada suatu titik tertentu. Bagi dunia usaha, karakteristik tersebut dapat mendorong munculnya model-model bisnis baru yang lebih efisien dan inovatif. Perkembangan teknologi digital juga berpotensi terus memacu inovasi sehingga menjadi lebih efisien. Selain itu, teknologi digital juga berpotensi memberikan manfaat dalam menciptakan ekosistem perekonomian yang lebih inklusif dan pada gilirannya mengurangi kesenjangan. Hal ini dikarenakan biaya untuk memperoleh informasi menjadi lebih murah dan penyebaran informasi menjadi lebih merata sehingga lebih banyak individu yang dapat memperluas akses pasar. Namun demikian, dampak keseluruhan terhadap keseniangan akan tergantung pada seberapa besar penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat luas dan dampaknya pada penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memiliki risiko yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Risiko tersebut antara lain terkait dengan risiko perilaku monopoli, risiko penyerapan tenaga kerja yang rendah, dan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Risiko monopoli dapat terjadi apabila perluasan pasar dan informasi dari teknologi digital hanya dapat diakses oleh beberapa pelaku ekonomi. Risiko rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat terjadi apabila perkembangan literasi digital tenaga kerja belum mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan tenaga kerja dengan kemampuan teknis tinggi juga terbatas. Apabila

hal ini terjadi, kesenjangan akan dapat meningkat. Sementara terkait sistem keuangan, teknologi digital menawarkan perluasan akses, kecepatan transaksi, dan biaya yang murah. Namun, inovasi model bisnis dan teknologi digital juga mengubah fungsi konvensional, khususnya perbankan, yang jika tidak diantisipasi bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko di sektor keuangan juga akan semakin kompleks seperti risiko pencucian uang dan kemungkinan pendanaan terorisme, cyber threat, risiko pada aspek perlindungan konsumen, serta risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Berbagai risiko ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan infrastruktur konektivitas digital ke seluruh wilayah, peningkatan kualitas modal manusia, dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

10.3. ARAH KEBIJAKAN

Secara umum, arah kebijakan ekonomi ditujukan untuk mengawal perekonomian menuju pertumbuhan yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan. Arah kebijakan ditempuh melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait. Bauran kebijakan meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, kebijakan fiskal, dan kebijakan struktural. Strategi kebijakan ditempuh dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sehingga menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Strategi kebijakan juga dilakukan guna memitigasi berbagai risiko jangka pendek sehingga tidak mengganggu berlanjutnya proses pemulihan ekonomi. Di samping itu, strategi kebijakan juga ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan jangka menengah sehingga tercipta struktur perekonomian yang semakin kuat dan berdaya tahan.

Kebijakan Moneter

Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan yang tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang telah tercapai. Hal ini mengingat stabilitas ekonomi merupakan prasyarat pokok bagi pemulihan ekonomi yang berkesinambungan. Bauran kebijakan Bank Indonesia terdiri atas tiga pilar kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan

kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SPPUR).

Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus memperkuat operasi moneter, menempuh kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya, dan melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan.

Bank Indonesia juga akan terus memperkuat operasi moneter guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Penguatan operasi moneter terus ditempuh untuk memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank dalam mengelola likuiditas dan mendukung terjaganya stabilitas suku bunga pasar uang. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memperkuat implementasi Giro Wajib minimum (GWM) rupiah rata-rata. Kebijakan yang telah diimplementasikan sejak Juli 2017 berdampak positif baik bagi ekonomi makro maupun mikro perbankan. Di sisi makro, kebijakan ini membantu percepatan pendalaman pasar keuangan melalui penciptaan instrumen-instrumen baru untuk menyerap tambahan likuiditas pada masa pemenuhan GWM rupiah ratarata, dan memperkuat stabilitas pasar uang. Di sisi mikro, kebijakan ini membantu bank meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas harian dan mengoptimalkan pendapatan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Penyempurnaan kebijakan akan ditempuh dengan memperluas implementasi GWM rata-rata hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valuta asing, baik bank konvensional maupun bank syariah. Penyempurnaan juga akan ditempuh dengan menyesuaikan rasio dan memperpanjang masa pemenuhan GWM rata-rata. Penyempurnaan akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan memerhatikan kondisi pasar keuangan dan kesiapan perbankan.

Kebijakan nilai tukar akan dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Guna memperkuat pengelolaan stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu. Bank

Indonesia akan memperkuat kerja sama bilateral untuk meningkatkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan mengggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS). Upaya ini ditempuh melalui pengembangan skema LCS yang difasilitasi oleh otoritas/bank sentral seperti bilateral currency swap arrangement (BCSA) dan skema LCS berbasis appointed cross currency dealers (ACCD) yang melibatkan peran otoritas dan sektor swasta dan diimplementasikan mulai awal tahun 2018.

Bank Indonesia juga akan terus mengembangkan swap lindung nilai nondolar AS kepada Bank Indonesia dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan. Mitigasi risiko nilai tukar dari utang luar negeri akan terus diperkuat. Bank Indonesia akan menyempurnakan pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, khususnya perluasan cakupan utang luar negeri. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan domestik untuk mampu menyediakan instrumen lindung nilai yang lebih efisien bagi korporasi, antara lain melalui penggunaan structured product seperti call-spread option.

Bank Indonesia terus meningkatkan efisiensi dan kredibilitas di pasar keuangan dengan melakukan penguatan baik di sisi regulasi maupun kelembagaan. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia akan menerbitkan regulasi mengenai penyelenggara sarana transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (market operator) untuk menciptakan pasar keuangan yang adil, teratur, dan transparan. Di sisi kelembagaan, Bank Indonesia dan otoritas terkait akan membentuk lembaga penyelesaian transaksi keuangan (central clearing counterparty) untuk transaksi keuangan derivatif yang dilakukan secara over-the-counter. Di samping itu, Bank Indonesia terus memperkuat kredibilitas pasar keuangan dengan mendorong pelaku pasar untuk memenuhi kewajiban sertifikasi tresuri guna meningkatkan profesionalisme dan daya saing di tingkat global.

Kebijakan Makroprudensial dan Sektor Keuangan

Bank Indonesia akan melanjutkan penguatan kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan di tengah stabilitas sistem keuangan yang terjaga dengan baik. *Stance* kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan terus dilanjutkan sebagai

langkah countercyclical guna memperbaiki arah siklus keuangan sehingga dapat mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi. Penguatan kebijakan makroprudensial ini akan difokuskan pada tiga aspek penting, yaitu: penguatan likuiditas, penguatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efektivitas instrumen.

Dari aspek penguatan likuiditas, Bank Indonesia akan mengimplementasikan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebagai bentuk penguatan GWM sekunder. Di dalam PLM, bank wajib memelihara instrumen likuid dengan besaran rasio sebesar 4% dari DPK dalam rupiah. Alat likuid yang diperhitungkan dalam perhitungan PLM adalah seluruh kepemilikan surat berharga bank dalam rupiah yang dapat direpokan ke Bank Indonesia sesuai ketentuan operasi moneter. Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, surat berharga tersebut dapat direpokan kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka paling banyak sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan likuiditas perbankan sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memitigasi risiko likuiditas.

Dari aspek penguatan fungsi intermediasi yang berkualitas, Bank Indonesia akan mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebagai bentuk penguatan dari loan to funding ratio (LFR). Besaran RIM akan ditargetkan dalam kisaran 80-92%. Berbeda dengan konsep LFR, RIM akan mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga seperti obligasi korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu ke dalam perhitungan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung pendalaman pasar keuangan. Sementara itu, dari aspek peningkatan efektivitas instrumen, Bank Indonesia akan terus menempuh upaya peningkatan efektivitas instrumen makroprudensial, termasuk opsi penerapan loan to value (LTV) secara targeted untuk memitigasi risiko terjadinya bubble sektor tertentu secara lebih spesifik.

Sesuai mandat Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas harga, kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diselaraskan dengan upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat pengembangan klaster UMKM yang terkait dengan upaya pengendalian inflasi dari sisi pasokan, khususnya pada komoditas pangan yang memengaruhi inflasi volatile food. Di samping terus memperkuat inovasi pada klaster yang telah ada, Bank Indonesia akan melakukan pula penambahan klaster baru. Pengembangan klaster tersebut terutama untuk wilayah yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan komoditas volatile food sesuai hasil pemetaan masing-masing daerah yang dimuat dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah.

Untuk meningkatkan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia juga akan menyiapkan kebijakan dan infrastruktur pada berbagai aspek, diantaranya kemudahan berusaha, produksi, pemasaran, dan keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memperkuat program pengembangan wirausaha yang telah dilakukan selama ini. Melalui program ini, bonus demografi diharapkan dapat dimanfaatkan melalui penciptaan wirausaha baru yang andal dan inovatif yang akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru sehingga meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan baru. Peningkatan kapabilitas yang dilakukan perlu didukung peningkatan intermediasi oleh perbankan kepada UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendorong bank untuk memberikan kredit kepada UMKM sesuai dengan kemampuan mengelola risiko.

Sejalan dengan bank umum konvensional, Bank Indonesia juga akan mengimplementasikan RIM dan PLM bagi perbankan syariah. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah yang telah diluncurkan pada 2017. Bank Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan terkait untuk secara konsisten mendorong tiga pilar strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tiga pilar tersebut adalah: (i) pemberdayaan ekonomi syariah; (ii) pendalaman pasar keuangan syariah; dan (iii) penguatan riset, asesmen, dan edukasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. (lihat Boks 10.3 Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia).

Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia akan terus mendukung efisiensi perekonomian dengan berpedoman pada *blueprint* Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) 2017-2024. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memastikan setiap transaksi ekonomi, tunai dan nontunai, berlangsung aman, efisien, dan lancar. Hal ini diperlukan guna memperkuat pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pada sistem pembayaran nontunai, arah kebijakan tetap difokuskan pada upaya lanjutan pembentukan ekosistem pembayaran nontunai yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, kompetitif, dan melindungi penggunanya. Terkait dengan pendirian Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Bank Indonesia akan memastikan berjalannya fungsi lembaga standar, services, dan switching yang merupakan tiga unsur utama kelembagaan di dalam GPN. Bank Indonesia juga akan terus mendorong kelembagaan GPN tersebut untuk memperluas cakupan interkoneksi dan interoperabilitas. Pada tahun 2018, fokus perluasan akan terletak pada pengembangan electronic bill invoicing, presentment, and payment (EBIPP) dalam rangka mengintegrasikan pembayaran tagihan rutin, khususnya yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Terkait dengan program elektronifikasi, Bank Indonesia akan memfasilitasi cakupan masyarakat penerima bansos nontunai yang semakin luas. Pada tahun 2018, target penyaluran bansos nontunai, baik terkait PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditambah menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bank Indonesia juga akan mendukung upaya Pemerintah memperkuat efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah mulai Januari 2018 sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri. Hal ini akan direalisasikan melalui perluasan program elektronifikasi, diantaranya penyaluran dana desa dan bantuan operasional sekolah secara nontunai serta smart city.

Perluasan cakupan elektronifikasi juga akan dilakukan melalui penggunaan sarana pembayaran nontunai pada sarana dan prasarana transportasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang baik. Untuk itu, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran tengah mengkaji proposal pendirian Electronic Fare Collection sebagai unsur kelembagaan yang nantinya akan mengintegrasikan sistem pembayaran antarmoda dan antar-operator. Inisiatif ini sekaligus menjadi persiapan integrasi transportasi yang akan dimulai di wilayah Jabodetabek pada tahun 2018. Terkait dengan penggunaan teknologi, Bank Indonesia bersama industri tengah membahas pendirian kelembagaan Electronic Toll Collection di ruas jalan tol menuju transaksi dengan teknologi berbasis nirsentuh (multilane free flow) mulai Desember 2018.

Terkait dengan sisi pengawasan, Bank Indonesia terus memperkuat kerangka kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran. Pada tahun 2018 ini, kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya memperkuat kerangka pengawasan sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi pengawasan berbasis risiko (risk based supervision).

Pada area pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia akan memastikan pemenuhan uang rupiah layak edar ke seluruh pelosok wilayah NKRI melalui centralized cash network planning (CCNP), serta melindungi masyarakat dari risiko uang palsu. Untuk pengedaran uang, Bank Indonesia tidak hanya memastikan pemenuhan dari sisi jumlah namun juga pemenuhan dari sisi pecahan. Terkait dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia akan menempuh tiga strategi utama. Pertama, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi layanan kas dengan berbagai pihak. Melalui kerja sama dengan perbankan dalam bentuk kas titipan, layanan kas telah dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun 2017. Bank Indonesia juga memperluas jangkauan layanan kas hingga tingkat kecamatan dan di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan terdepan) melalui program Bl-Jangkau dan Kas Kepulauan. Kedua, Bank Indonesia akan memastikan terjaganya pasokan uang rupiah yang berkualitas dan terus memperkuat unsur keamanannya. Ketiga, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kualitas uang rupiah dan melindungi masyarakat dari risiko uang rupiah palsu. Untuk itu, pembinaan terhadap perusahaan jasa pengelolaan uang rupiah (PJPUR) akan diintensifkan.

Koordinasi Kebijakan

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan yang ditempuh, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan para pemanaku kepentingan, baik di tinakat pusat maupun di tingkat daerah. Media koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah yang selama ini sudah berjalan baik akan terus diperkuat, termasuk dalam bentuk: (i) Round Table Policy Dialogue (RTPD); (ii) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); (iii) Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda); (iv) Investor Relation Unit (IRU) baik di tingkat pusat maupun daerah; (v) Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK); (vi) Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); (vii) Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI); dan (viii) Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Sementara itu, dalam rangka mendorong reformasi struktural, Bank Indonesia dan Pemerintah melakukan koordinasi melalui kelompok kerja (POKJA) untuk mengevaluasi dan menganalisis dampak pelaksanaan paket kebijakan ekonomi.

Dalam rangka memperdalam pasar keuangan melalui FK-PPPK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK akan menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). SN-PPPK akan memuat elaborasi rencana kerja yang dibangun dari tiga pilar pengembangan, meliputi (i) sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko; (ii) pengembangan infrastruktur pasar keuangan; dan (iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi. Melalui SN-PPPK ini, untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki visi bersama dan program kerja yang terukur menuju terbentuknya pasar keuangan Indonesia yang lebih kuat.

Guna memperkuat stabilitas pasar uang, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengelola likuiditas secara optimal. Komunikasi bersama kedua lembaga kepada pelaku pasar mengenai komitmen menjaga likuiditas akan terus diperkuat. Hal tersebut berfungsi sebagai langkah antisipatif, terutama saat terjadi lonjakan permintaan likuiditas pada waktu-waktu tertentu.

Terkait stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi informasi hasil pengawasan bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik

telah dilaksanakan secara periodik sebagaimana amanat pasal 17 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Kerjasama Bank Indonesia dengan LPS akan terus diperkuat, termasuk dalam hal pertukaran data dan informasi kepemilikan SBN LPS, menyusul telah disepakatinya Perjanjian Kerjasama Pembelian SBN LPS oleh Bank Indonesia.

Terkait penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran, sinergi kebijakan yang baik antar-otoritas dibutuhkan untuk merespons pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memastikan kelancaran proses pendaftaran penyelenggara teknologi finansial (tekfin), termasuk e-Commerce, sebagaimana digariskan oleh Peraturan Bank Indonesia Tekfin. Bank Indonesia berupaya untuk menginisiasi regulatory sandbox. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari sisi pengelolaan uang rupiah, upaya dalam meningkatkan kualitas uang rupiah dan memitigasi risiko beredarnya uang palsu terus diperkuat. Hal ini dilakukan melalui koordinasi antara Bank Indonesia dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yang terdiri dari: (i) Badan Intelijen Negara; (ii) Kepolisian; (iii) Kejaksaaan Agung; dan (iv) Kementerian Keuangan. Koordinasi yang dilakukan meliputi upaya mencegah, mengungkap dan menindak tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Upaya ini dipadukan dengan meningkatkan kualitas edukasi dan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait, mengintegrasikan sistem informasi Bl-Counterfeit Analysis Center dengan perbankan dan aparat kepolisian, serta mendirikan laboratorium analisis uang palsu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam tatanan internasional, Bank Indonesia melakukan penguatan koordinasi untuk mengantisipasi meningkatnya intensitas kerja sama perjanjian perdagangan internasional di masa depan dan kecenderungan negara peers dalam menjalin kerja sama serupa. Untuk itu, perlu desain suatu strategi dan mekanisme kerja yang komprehensif agar Indonesia dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya dari keterbukaan tersebut.

Dalam konteks kerja sama internasional yang lebih luas, keterlibatan Bank Indonesia dalam Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dijalin Pemerintah dilakukan untuk

mengamankan ruang kebijakan. Selain itu, keterlibatan Bank Indonesia juga bertujuan untuk menjaga konsistensi komitmen liberalisasi dengan arah pengembangan sektor jasa sistem pembayaran/tekfin yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia secara aktif mendukung Pemerintah dalam proses integrasi sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk memperkuat proses perumusan posisi Indonesia dan koordinasi di level nasional, Bank Indonesia akan terus mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan dedicated team meeting sektor keuangan untuk dijadikan sarana koordinasi dan kalibrasi posisi masing-masing instansi terkait pada kerja sama FTA/CEPA.

Koordinasi juga dilakukan secara konsisten oleh Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan sovereign credit rating Indonesia, termasuk memastikan terciptanya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat Regional Investor Relation Unit (RIRU) dan Global IRU (GIRU) melalui penajaman fungsi hubungan investor di kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri dan luar negeri. Penguatan fungsi RIRU dan GIRU ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi aliran modal asing ke Indonesia guna mendukung pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan melalui linkage di antara ketiga unit hubungan investor, yakni IRU di Kantor Pusat, RIRU di kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri, dan GIRU di kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Penguatan dilakukan pada tiga elemen utama unit hubungan investor, yakni kelembagaan, strategi hubungan investor, serta diseminasi data dan informasi.

Kebijakan Fiskal

Pemerintah menetapkan tiga strategi kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Strategi pertama ialah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Strategi kedua yakni efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Strategi ketiga berfokus pada upaya mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Pada strategi pertama, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan penerimaan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan antara lain melalui (i) pelaksanaan pertukaran data informasi perpajakan/automatic exchange of

information (AEoI) untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak; (ii) pemanfaatan data dan implementasi sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi; dan (iii) pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi dan usaha. Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditempuh dengan tetap memerhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kebijakan PNBP antara lain ditempuh melalui penyempurnaan peraturan (Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP) dan penerapan production sharing contract/PSC gross split.

Terkait upaya efisiensi belanja negara, Pemerintah akan memperkuat kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, serta sanitasi dan air bersih. Selain itu, efisiensi belanja nonprioritas terus dilakukan antara lain melalui: (i) belanja barang dan subsidi yang tepat sasaran; (ii) sinergi program perlindungan sosial; (iii) refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; serta (iv) penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan memperbaiki pelayanan publik.

Dalam hal pembiayaan, Pemerintah akan berfokus kepada keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan. Hal ini ditempuh melalui pengendalian defisit dan rasio utang, penurunan defisit keseimbangan primer, dan pengembangan creative financing. Pengembangan creative financing dilakukan melalui skema KPBU.

Kebijakan Struktural

Kebijakan reformasi struktural diarahkan pada tiga ruang lingkup utama guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkesinambungan. Ruang lingkup pertama terkait dengan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, peningkatan kapasitas inovasi dan kualitas modal manusia, serta perbaikan sisi kelembagaan yang meliputi iklim usaha, tata kelola, dan layanan birokrasi. Ruang lingkup kedua terkait dengan upaya untuk memperbaiki daya saing industri dan jasa, serta upaya untuk memastikan perekonomian domestik dapat tumbuh secara inklusif,

ditunjang oleh pembiayaan yang berkesinambungan. Ruang lingkup ketiga terkait dengan kebijakan untuk mengantisipasi dampak perkembangan teknologi digital yang sangat pesat sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian disertai upaya meminimalkan potensi risiko yang mengemuka.

Terkait penyediaan infrastruktur, Pemerintah tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur, yang meliputi peningkatan kapasitas energi, penguatan konektivitas nasional dan penguatan konektivitas digital. Untuk memelihara momentum reformasi struktural, tercapainya target pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Hingga saat ini, kemajuan pembangunan infrastruktur memberikan optimisme bagi prospek perekonomian ke depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan proyek infrastruktur yang sudah lebih dari separuhnya dalam tahap konstruksi. Dengan perkembangan tersebut, pencapaian target penyelesaian seluruh proyek PSN pada tahun 2019 diharapkan dapat terealisasi. Konektivitas nasional yang semakin kuat diharapkan dapat mendukung penurunan waktu tempuh dan biaya logistik di dalam dan dari/ke Indonesia.

Guna meningkatkan kualitas modal manusia, Pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan sektor pendidikan. Secara umum, pembangunan di sektor pendidikan antara lain mencakup peningkatan rata-rata masa sekolah dan kualitas lulusan sekolah menengah dan tinggi (Tabel 10.5). Untuk meningkatkan peran swasta, perusahaan perlu didorong untuk menyediakan pelatihan formal sehingga kemampuan dan produktivitas pekerja meningkat. Sementara itu, sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, komitmen pengembangan modal manusia pada sektor pendidikan perlu tetap dilakukan oleh Pemerintah melalui pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. Melalui pendidikan vokasi, diharapkan terjadi percepatan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih siap masuk pasar kerja, termasuk melakukan rintisan usaha secara mandiri/wirausaha. Pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas juga diharapkan akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, peningkatan kualitas guru akan terus dilanjutkan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Terkait hal tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup pengelolaan, penempatan, distribusi, dan redistribusi yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan

Tabel 10.5. Sasaran Pokok Bidang Pendidikan

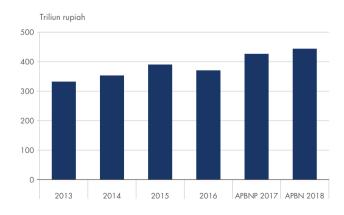
No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 tahun
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

komprehensif, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Dari sisi anggaran, komitmen nyata Pemerintah dalam mendukung peningkatan sektor pendidikan juga tercermin pada anggaran untuk sektor pendidikan yang terus meningkat (Grafik 10.35).

Terkait kelembagaan, Pemerintah akan terus memperkuat aspek kelembagaan yang mendukung efisiensi dunia usaha, terutama melalui perbaikan iklim usaha dan reformasi birokrasi. Untuk memperbaiki iklim usaha, Pemerintah akan menempuh sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha serta penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama sektor pengolahan dan jasa. Sejumlah paket kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan

Grafik 10.35. Anggaran Pendidikan



Sumber: Kementerian Keuangan

terkait kelembagaan telah digulirkan. Hingga akhir tahun 2017, sebanyak 215 peraturan yang menghambat perkembangan dunia usaha telah berhasil dideregulasi. Bahkan, sebanyak 130 proyek telah difasilitasi melalui layanan izin investasi 3 jam sebagai bagian dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Berbagai komitmen dan upaya kuat Pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif menjadikan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha meningkat 19 peringkat. Ke depan, upaya reformasi kelembagaan tersebut tetap dilanjutkan sehingga sepenuhnya mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif juga didukung oleh penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi birokrasi. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah akan tetap menempuh sejumlah langkah percepatan penyempurnaan birokrasi mencakup: (i) penguatan reformasi birokrasi; (ii) penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (iii) penguatan integritas aparatur; (iv) penguatan organisasi kementerian/lembaga; (v) penguatan tata laksana; dan (vi) penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur; serta (vii) peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai upaya reformasi kelembagaan yang dijalankan paralel dengan penguatan daya saing perekonomian diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan menjadi negara dengan pendapatan perkapita yang tinggi.

Sejalan dengan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas industri, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas melalui peningkatan fasilitasi ekspor serta peningkatan kualitas dan standar produk ekspor Indonesia. Pemerintah juga memprioritaskan upaya untuk mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa. Hal ini dilakukan melalui percepatan hilirisasi pengolahan sumber daya alam di lima kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasiskan potensi ekonomi. Upaya tersebut juga dilengkapi dengan percepatan pembangunan tiga kawasan industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah, didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, dan energi, serta pengembangan SDM.

Guna mendorong perekonomian yang semakin inklusif dan semakin sejahtera, Pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional. Program prioritas terkait hal tersebut ditujukan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan yang lebih merata sehingga dapat dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Sejumlah langkah yang akan ditempuh antara lain melalui pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi. Terkait jaminan dan bantuan sosial, Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan, serta meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, Pemerintah akan terus berupaya untuk memperluas penyediaan sarana dan infrastruktur dasar. Sementara itu, kebijakan terkait perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi akan diarahkan antara lain: (i) untuk meningkatkan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) meningkatkan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha; serta (iii) memperkuat kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.

Terakhir, berbagai kebijakan struktural tersebut akan ditopang oleh kebijakan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai basis dalam memperkuat kesinambungan sumber pembiayaan pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, sumber-sumber pendanaan proyek yang baru perlu terus diciptakan mengingat keterbatasan pembiayaan pemerintah melalui APBN. Terkait dengan hal ini, Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Skema KPBU pada 2018 ditargetkan akan mencakup: (i) 13 proyek senilai 3,7 miliar dolar AS dengan status financial close; (ii) 10 proyek senilai 1,1 miliar dolar AS dengan status transaksi sampai dengan penandatanganan kontrak; serta (iii) 29 proyek senilai 12,1 miliar dolar AS termasuk 12 proyek under calculation dengan status persiapan (Gambar 10.3).

Sumber pembiayaan lain yang perlu terus dikembangkan ialah pasar keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus berupaya mendorong peran pasar keuangan dengan menitikberatkan pada pengayaan instrumen dan perluasan basis investor. Berbagi upaya tersebut ditempuh dengan dukungan koordinasi bersama Pemerintah dan OJK dalam FK-PPPK. Pengayaan instrumen diwujudkan dengan mengembangkan instrumen keuangan yang inovatif untuk mendukung pembiayan infrastruktur, antara lain obligasi infrastruktur, reksa dana infrastruktur, dan dana investasi infrastruktur. Pada saat bersamaan, upaya

Gambar 10.3. Target Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)



Sumber: Bappenas

juga ditempuh untuk memperluas basis investor, khususnya investor institusi. Di pasar saham dan obligasi, upaya perluasan basis investor juga difokuskan pada investor domestik agar kerentanan terhadap gejolak eksternal dapat diminimalkan.

Dari sisi perbankan, salah satu kebijakan OJK dalam pengembangan industri perbankan hingga lima tahun ke depan adalah untuk mewujudkan perbankan yang kontributif terhadap pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait hal ini, OJK turut mendorong peningkatan pembiayaan terhadap

sektor-sektor prioritas. Secara lebih spesifik, strategi untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara OJK dengan instansi/lembaga lain dalam rangka mewujudkan peran perbankan tersebut antara lain: (i) mendukung pendanaan di sektor energi dan penyediaan infrastruktur; (ii) menyempurnakan regulasi prudensial yang dapat mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan penyediaan pendanaan sektor ekonomi prioritas; serta (iii) meningkatkan struktur permodalan dan kelembagaan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi.

Boks 10.1. _

Dampak Paket Kebijakan Ekonomi terhadap Perekonomian

erbaikan kualitas institusi merupakan salah satu prioritas kebijakan reformasi struktural Pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE) yang salah satu fokusnya adalah pada peningkatan kualitas institusi guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut dicapai antara lain dengan cara menghilangkan duplikasi dan menciptakan konsistensi peraturan (deregulasi), menyederhanakan dan memudahkan perizinan (debirokratisasi), serta menurunkan atau menghilangkan tarif pajak (insentif fiskal).

Berdasarkan perhitungan distance to frontier oleh OECD, kualitas institusi di Indonesia masih tergolong rendah.¹ Oleh karena itu, pilihan prioritas pada perbaikan kualitas institusi berpotensi memberi dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.² Selain itu, perbaikan institusi merupakan pilihan kebijakan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, berbiaya rendah, dan memberi hasil yang relatif cepat bila dibandingkan kebijakan reformasi struktural lain.

Kualitas institusi dapat diukur dengan indikator *product* market regulation (PMR) yang dikembangkan oleh OECD. Indikator PMR tersebut dikembangkan untuk negara anggota OECD maupun untuk beberapa negara lain yang bukan merupakan anggota OECD, termasuk Indonesia.³ Pengembangan indikator PMR dilatarbelakangi studi empiris yang menunjukkan bahwa kompetisi dapat meningkatkan pendapatan per kapita melalui

pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong industri untuk lebih inovatif dan efisien sehingga memperbaiki produktivitas.⁴

Indikator PMR memungkinkan negara-negara untuk memilih kebijakan perbaikan kualitas institusi yang sesuai prioritas. Indikator PMR mencakup tiga bagian utama (high level indicator) yakni: (i) state control atau keterlibatan pemerintah dalam dunia usaha; (ii) barriers to entrepreneurship atau hambatan kewirausahaan; dan (iii) barriers to trade and investment atau hambatan investasi dan perdagangan. Ketiga bagian tersebut merupakan indeks komposit dari 7 middle level indicator dan 18 low level indicator.

Setiap indikator memiliki skor yang berkisar antara 0 (regulasi tidak menghambat kompetisi) sampai dengan 6 (regulasi sangat menghambat kompetisi). Selanjutnya, skor tersebut akan dijumlahkan dengan bobot tertentu sehingga membentuk indeks PMR. Setiap negara kemudian dapat menyesuaikan pilihan kebijakannya masing-masing untuk memperkecil selisih indeks PMR dengan negara frontier. Dengan kata lain, perbaikan kualitas institusi dapat dicapai melalui kebijakan yang berbeda-beda sesuai karakteristik ekonomi negara yang bersangkutan.

Untuk mengukur dampak pelaksanaan PKE, Rakhman et. al. (2018) melakukan simulasi self assessment dengan memanfaatkan instrumen indikator PMR.⁵ Hasil simulasi menunjukkan bahwa PKE dapat memperbaiki indeks PMR Indonesia dari 2.85 (hasil perhitungan PMR tahun 2013) menjadi 2.47 (simulasi untuk PMR tahun 2017). Perbaikan terutama pada indikator barrier to trade and investment yang menurun hingga 25% (Grafik 1). Secara lebih rinci, perbaikan signifikan yang disumbangkan oleh PKE terjadi pada komponen other barriers to trade and investment, involvement in business operation, dan administrative burdens on startups (Grafik 2).

Implementasi PKE berpotensi dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hasil simulasi lebih lanjut menunjukkan dampak perbaikan

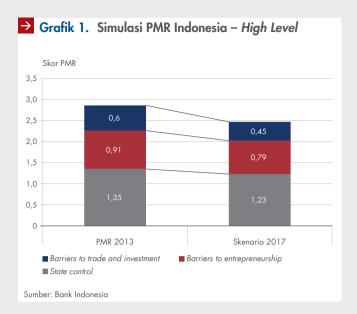
¹ Distance to frontier didefinisikan sebagai pengukuran jarak indeks dengan negara yang dianggap memiliki performance terbaik. Frontier untuk aspek institusi adalah Hungaria. Distance to frontier Indonesia pada aspek institusi adalah 47% berdasarkan data OECD [2013].

² Hausmann, R. et al. (2008). Doing Growth Diagnostics in Practice: A 'Mindbook'. CID Working Papers 177, Center for International Development at Harvard University.

³ Pengukuran indikator PMR dilakukan setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1998. Indikator PMR untuk Indonesia tersedia sejak tahun 2008.

⁴ Bourlès, R. et al. (2010). Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity Growth: Panel Data Evidence for OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, No. 791.

⁵ Rakhman, R. et al. (2017). Kajian Dampak Reformasi Struktural. Laporan Hasil Penelitian Bank Indonesia.





indikator PMR terhadap kondisi perekonomian dengan menghitung manfaatnya terhadap kenaikan total factor productivity (TFP). Secara umum, perubahan TFP suatu negara dimodelkan sebagai dampak dari perubahan TFP dunia (spillover effect), selisih TFP dengan negara frontier (technology catch up effect), dan hambatan regulasi (indeks PMR). Berdasarkan estimasi yang dilakukan, sumbangan kenaikan TFP akibat paket kebijakan ekonomi pemerintah akan terus meningkat hingga beberapa tahun ke depan (Tabel 1). Sumbangan kenaikan TFP diprakirakan sebesar 0,03% pada 2017 dan akan terus meningkat hingga mencapai 0,62% pada 2022. Dampak kenaikan TFP tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi PKE dikawal dengan pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan PKE.8 Dalam satuan tugas ini, Bank Indonesia turut berperan aktif khususnya di kelompok kerja (Pokja) III yang membidangi evaluasi dan analisis dampak kebijakan ekonomi. Secara umum, tugas Pokja III meliputi (i) melakukan pemantauan dan inventarisasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi; (ii) melakukan evaluasi dan menganalisis efektivitas dan dampak pelaksanaan kebijakan ekonomi; (iii) melakukan kajian atas usul deregulasi baru; dan (iv) menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan ekonomi kepada satuan tugas.

Tabel 1. Sumbangan Kenaikan TFP dari Perbaikan PMR di Indonesia

Tahun	Sumbangan Kenaikan TFP
2017	0,03%
2018	0,24%
2019	0,38%
2020	0,49%
2021	0,57%
2022	0,62%

Sumber: Bank Indonesia

⁶ Metode yang digunakan adalah panel data merujuk pada Bourlès, R. et al. (2010).

⁷ Elastisitas TFP terhadap pertumbuhan ekonomi diasumsikan sama dengan satu.

Satgas dibentuk sebagai pelaksanaan instruksi presiden (Impres) No. 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha. Satgas pelaksanaan PKE terdiri dari unsur pimpinan, unit pendukung, dan Pokja I-IV.

Boks 10.2.

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

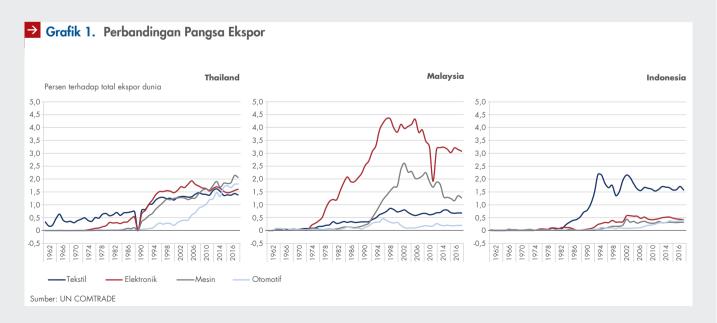
ndonesia menghadapi tantangan spesifik dalam mewujudkan integrasi ekonomi. Dari sisi eksternal, ekonomi Indonesia belum memiliki posisi yang kuat dalan rantai pasokan global (global supply chain) karena masih didominasi oleh produksi barang-barang bernilai tambah kecil. Dari sisi internal, sebagai negara kepulauan dengan karakteristik daerah yang beragam, ekonomi Indonesia tidak dapat dilihat sebagai satu entitas ekonomi yang tunggal dan cukup dilayani oleh satu kebijakan nasional.

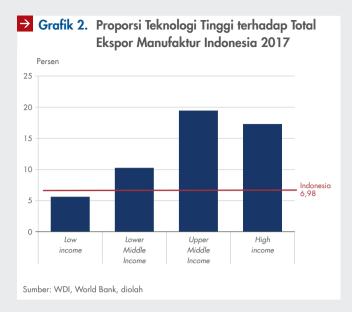
Kontribusi ekspor mencerminkan strategi pertumbuhan suatu negara (Grafik 1). Sebagai contoh, strategi upgrading manufaktur Thailand diawali dari industri tekstil, yang merupakan industri dengan teknologi lebih rendah namun bersifat padat karya, dilanjutkan dengan industri elektronik yang memiliki tingkatan teknologi lebih tinggi, dan diakhiri dengan industri mesin dan otomotif yang bersifat padat modal. Sementara itu, Malaysia memilih strategi pertumbuhan yang berbeda dengan langsung melompat ke industri elektronik, dalam hal ini semikonduktor. Di sisi lain, selama tiga dekade Indonesia masih mengandalkan industri tekstil sebagai

mesin pertumbuhan ekspor. Dengan sifat industri tekstil yang padat karya dan memiliki nilai tambah kecil, sektor industri Indonesia akan sulit mendukung cita-cita untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Reformasi struktural adalah suatu keniscayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkesinambungan. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Indonesia perlu merumuskan kembali model dan strategi pertumbuhan ekonominya. Model pertumbuhan tidak dapat lagi mengandalkan upah buruh yang murah dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Saat ini, proporsi ekspor Indonesia dengan teknologi tinggi masih berada di kisaran 6,98%, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara dalam kelompok lower middle income. Untuk memasuki kelompok upper middle income, Indonesia membutuhkan peningkatan signifikan pada kapabilitas industri, kapasitas inovasi, kualitas barang, dan keahlian tenaga kerja agar dapat memproduksi barang ekspor berteknologi tinggi (Grafik 2).

Tantangan berikutnya dalam mendesain strategi pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional adalah keragaman kondisi setiap daerah. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu memperhitungkan karakteristik daerah. Untuk membangun ekosistem inovasi berbasis industri, perlu dicari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian diintegrasikan pada tingkat nasional. Secara khusus, pencarian sumber-sumber tersebut perlu mempertimbangkan variasi jenis dan ketersediaan sumber daya di masing-masing kawasan di Indonesia.



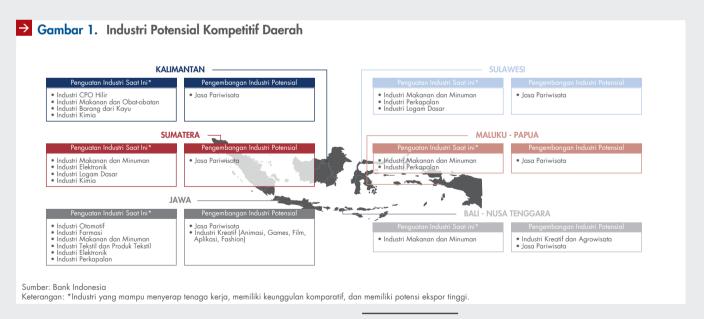


Penelitian oleh Ridwan et. al (2017) mengukur keunggulan relatif suatu daerah di Indonesia dalam memproduksi suatu kelompok barang dalam kaitan dengan perdagangan internasional (ekspor).¹ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan RCPA (revealed comparative product advantage) dan LQ (location quotient).2 Selanjutnya, sektor ekonomi potensial yang telah teridentifikasi dipilih

untuk menjadi industri potensial kompetitif daerah (IPKD) berdasarkan sejumlah kriteria (Gambar 1).3

Secara ringkas, hasil penelitian menyimpulkan bahwa industri manufaktur masih tetap diperlukan sebagai motor penggerak pertumbuhan, namun ekonomi Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah sektor ekonomi potensial lain seperti industri kreatif dan industri pariwisata. United Nations World Tourism Organization, lembaga pariwisata dunia di bawah PBB, bahkan memprakirakan sektor pariwisata akan menjadi sumber devisa utama Indonesia dalam tahun-tahun mendatang.

Pengembangan industri potensial kompetitif daerah memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Bank Indonesia melalui 45 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) yang tersebar di 34 provinsi turut berperan aktif mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk strategic advisory kepada Pemerintah Daerah khususnya terkait pengelolaan inflasi dan stabilitas sistem keuangan di daerah⁴. Selain itu, KPwDN juga aktif melaksanakan program-program yang dapat mendukung pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pengembangan UMKM dan peningkatan keuangan inklusif.



- Ridhwan, MHA. et al. (2017). Regional Growth Strategy. Working Paper Bank Indonesia, forthcoming.
- Balassa, B. and Marcus Noland (1989). Revealed Comparative Advantage in Japan and the United States. Journal of International Economic Integration. 2(2): 8-22.
- Kriteria tersebut adalah (1) Menyerap tenaga kerja dan menopang perbaikan kesejahteraan/kemiskinan (2) Memiliki keunggulan komparatif dengan potensi bahan baku lokal & pasar (berdaya saing tinggi) (3) Mendorong kemajuan sektor lain (forward & backward linkages tinggi) (4) Memberikan nilai tambah tinggi & menopang kinerja ekspor serta menghasilkan devisa (5) Menjadi agen transformasi struktur ekonomi nasional.
- 4 Peran tersebut merupakan bagian dari sembilan fungsi KPwDN Bank Indonesia yang menjadi amanat Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI).

Boks 10.3. -

Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

konomi dan keuangan syariah pada dasarnya bukan konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk umat Islam. Ekonomi syariah bersifat inklusif yang secara aktif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam suatu pergerakan roda perekonomian. Konsep yang inklusif ini menjadi salah satu faktor pendorong pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia internasional, termasuk di Indonesia.

Kinerja ekonomi dan keuangan syariah global memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Pada 2016, volume industri halal global telah mencapai 5,80 triliun dolar AS dan diprakirakan akan terus meningkat hingga mencapai 9,30 triliun dolar AS pada 2022 mendatang. Peluang ini memicu berbagai negara untuk berlombalomba menjadi pemain di industri produk halal global dan tidak terbatas pada negara dengan penduduk mayoritas muslim.

Industri keuangan syariah tumbuh tinggi di Indonesia. Namun, di sektor industri syariah lainnya, seperti makanan halal, wisata halal, fashion syariah, dan industri obat dan kosmetik halal, Indonesia secara umum berperan hanya sebagai pasar yang besar.

Pada tahun 2016, volume pasar makanan halal di Indonesia, yang merupakan pasar utama produk halal domestik dan juga menempati peringkat pertama dalam pasar global, diprakirakan telah mencapai 169,7 miliar dolar AS.¹ Di satu sisi, hal ini memperlihatkan besarnya potensi ekonomi syariah domestik. Di sisi lain, sejalan dengan penerapan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2019, pasar yang besar ini juga dapat menjadi kendala jika ternyata kebutuhan produk halal tersebut tidak dapat dipenuhi dari

dalam negeri. Hal tersebut dapat mendorong impor dan berimplikasi pada kondisi neraca pembayaran Indonesia.

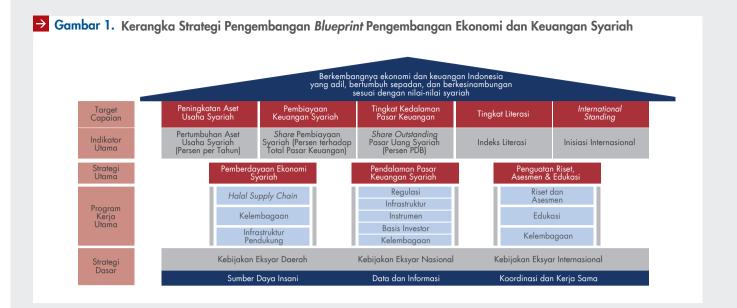
Oleh karena itu, potensi industri halal tersebut perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah integrasi antara sumber daya di sektor keuangan komersial syariah (*Islamic commercial finance*) dan sektor keuangan sosial syariah (*Islamic social finance*) yang mencakup zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Jika dikelola dengan baik, ZISWAF dapat berperan aktif mewujudkan distribusi pendapatan dan kesempatan serta memberdayakan masyarakat secara inklusif. Sebagai bentuk partisipasi aktif sosial masyarakat, ZISWAF juga berpotensi mendukung berbagai program investasi nasional yang terkait dengan kepentingan publik seperti infrastruktur dan rumah sakit.

Indonesia memiliki banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam lain yang jika dioptimalkan dapat berperan sebagai pelaku, pendidik, dan penggiat ekonomi syariah yang handal. Lembaga-lembaga pendidikan Islam ini tidak hanya memiliki sumber daya insani yang besar, namun juga kemampuan distribusi yang luas dengan melibatkan perekonomian masyarakat sekitar hingga ke unit ekonomi terkecil.

Untuk dapat mewujudkan berbagai potensi ekonomi dan keuangan syariah tadi, diperlukan suatu strategi, kebijakan serta program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif, integratif, efektif, dan efisien. Pemerintah telah melihat potensi yang sangat besar dari sistem ekonomi dan keuangan syariah dan berupaya untuk merealisasikannya dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Perpres No. 91 tahun 2016. Keberadaan KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, diharapkan dapat mensinergikan kebijakan-kebijakan dan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari berbagai otoritas dan lembaga terkait. Bank Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah KNKS mendukung penuh upaya koordinasi yang disinergikan dalam wadah KNKS.

Bank Indonesia senantiasa memberikan dukungan pada pengembangan keuangan syariah di Indonesia dan pada tahun 2017 merupakan momentum dukungan aktif Bank Indonesia kepada pengembangan ekonomi

¹ State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018. Thomson Reuters.



syariah nasional. Sebagai wujud nyata dari dukungan tersebut, Bank Indonesia telah meluncurkan blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut memiliki tiga fokus strategi utama yang selaras dengan program nasional Pemerintah demi mendukung tercapainya kemandirian ekonomi Indonesia.

Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Syariah yang menitikberatkan pada pengembangan sektoral usaha syariah melalui penguatan seluruh kelompok pelaku usaha baik besar, menengah, kecil, maupun mikro, serta kalangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Berbagai pelaku usaha ini selanjutnya akan menjadi bagian dari sistem kemitraan halal value chain di berbagai sektor unggulan ekonomi syariah seperti pertanian, industri pengolahan, dan energi terbarukan.

Kedua, Pendalaman Pasar Keuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen likuiditas dan pembiayaan syariah guna mendukung pengembangan usaha syariah. Strategi ini dilakukan dengan peningkatan variasi instrumen keuangan syariah, minat investor dan volume transaksi serta penguatan regulasi dan infrastruktur. Cakupan strategi ini tidak terbatas pada sektor keuangan komersial, namun juga pada sektor keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Melalui strategi ini diharapkan terbentuk integrasi antara kedua sektor keuangan syariah tersebut.

Ketiga, Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menyiapkan sumber daya insani yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional. Dalam praktiknya, strategi ini ditempuh melalui penyusunan program edukasi yang memiliki relevansi kuat pada kebutuhan industri, pengembangan kurikulum, pengayaan program vokasi, dan profesi industri ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai program sosialisasi yang menyeluruh dan terintegrasi.

Strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan didukung oleh kebijakan dan koordinasi. Implementasi strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan didukung oleh kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional, internasional maupun daerah. Selain itu, strategi akan diperkuat dengan koordinasi dan kerjasama untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan berperan sebagai regulator sesuai wilayah kewenangannya. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai akselerator dan inisiator, berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung implementasi berbagai program yang telah dirumuskan.

